



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

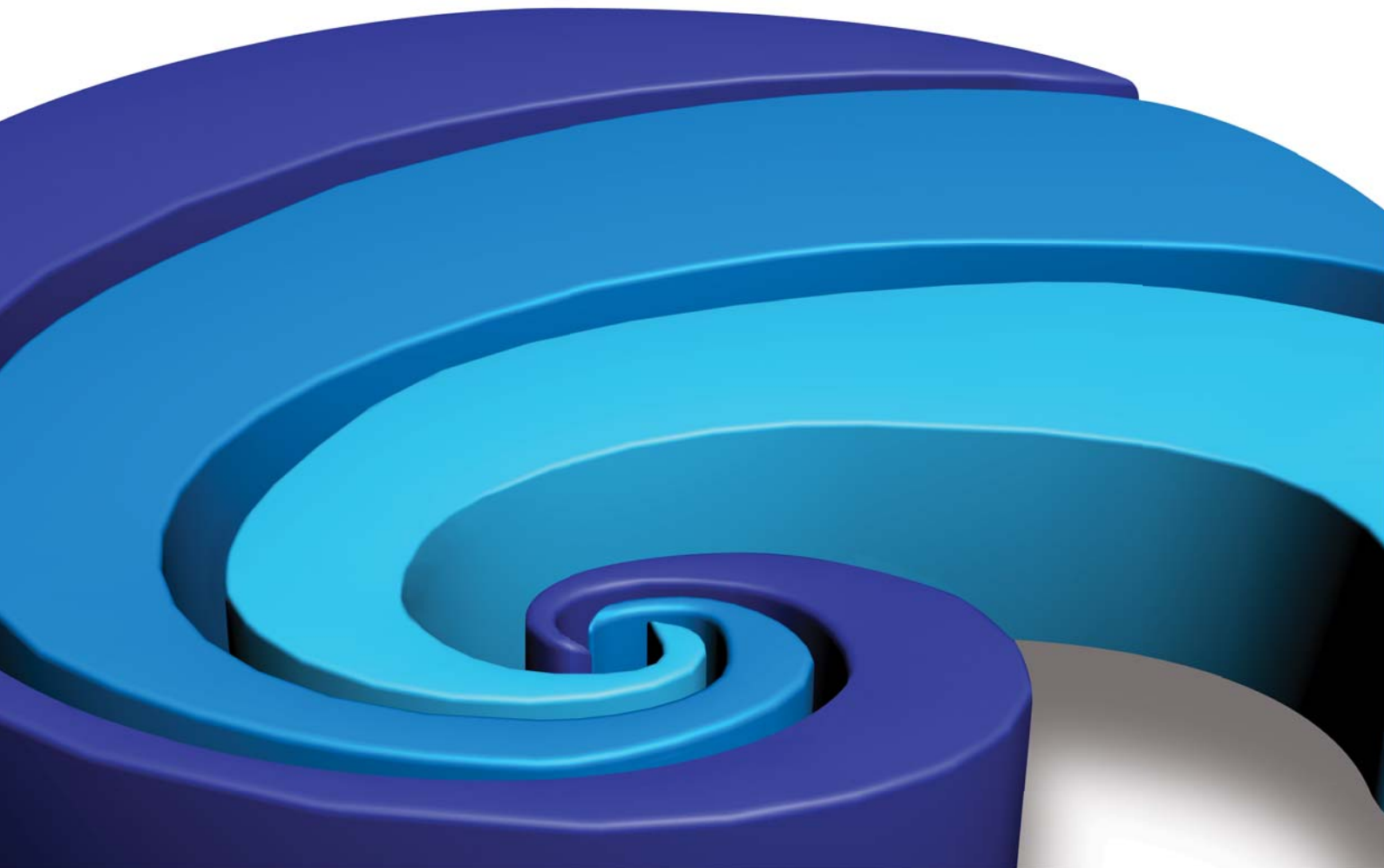


Laporan Tahunan **2015**



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2015



Kata Pengantar

**Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2015.

Tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat kemajuan yang berarti dalam menghadapi berbagai tantangan yang dialami oleh industri telekomunikasi dan informatika.

Pencapaian utama yang berhasil dilaksanakan Kemkominfo selama tahun 2015 antara lain, penataan pita frekuensi 1800 MHz dan peluncuran layanan Broadband 4G LTE, penandatanganan kontrak paket barat dan tengah pembangunan Jaringan Tulang Punggung Pitalebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring), pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan, penanganan konten internet bermuatan negatif dan implementasi tenaga humas pemerintah untuk mendukung *Government Public Relations*.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh pegawai Kemkominfo dalam menjalankan organisasi dengan tata kelola dan kinerja yang baik, sehingga Kemkominfo berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, dengan terbitnya Laporan Tahunan Tahun 2015, informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai tren komunikasi dan informatika sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bagi para penyedia dan pengguna jasa telekomunikasi dan informatika di Indonesia.

Jakarta, 6 April 2016

Sekretaris Jenderal,



Farida Dwi Cahyarini

≡ daftar isi



PENGANTAR

1



BAB I KILAS KERJA 2015

PERISTIWA PENTING TAHUN 2015

6

HIGHLIGHT KEMKOMINFO

1. *Highlight* Capaian Kinerja KEMKOMINFO 2015
2. *Highlight* Laporan Keuangan

7
8

STATISTIK BIDANG KOMINFO

1. Penyelenggaraan Pos
2. Jangkauan Sinyal
3. Pertumbuhan Telepon Seluler di Indonesia
4. Peran Bidang Informasi dan Informatika dalam Pendapatan Nasional
5. Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi

10
11
12
14
14



BAB II PROFIL KEMENTERIAN

STRUKTUR ORGANISASI

16

SUMBER DAYA MANUSIA

17

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

18



BAB III KINERJA KEMENTERIAN

PELAYANAN PUBLIK DAN

PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE

1. Penyederhanaan Proses Perizinan
2. Sistem Perizinan Telekomunikasi dan Pos (*E-Licensing*)
3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penciptaan *Good Governance*

20
22
23

KEBIJAKAN

1. Penataan Pita 1800 MHz	24
2. Kebijakan TKDN 4G LTE	25
3. Kebijakan Kartu Prabayar	26
4. Nomor Panggilan Tunggol Darurat (<i>Single Emergency Number</i>)	27
5. Migrasi TV Analog ke Digital	28
6. Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara	29
7. Mekanisme Partisipasi Publik	29

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia	30
2. Penyediaan Akses Internet	31
3. Penyediaan Sistem Desa Broadband terpadu	33
4. Penyediaan BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	34
5. Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	35
6. ITTS Phase II	38

TATA KELOLA INTERNET

1. Peningkatan <i>e-Government</i> Indonesia (PeGI)	39
2. <i>E-Commerce</i>	40
3. Keamanan Informasi dan Jaringan Internet	42
4. <i>Trust +</i>	45

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DAN

DISEMINASI INFORMASI

1. <i>Government Public Relations</i> (GPR)	46
2. Diseminasi Informasi Melalui <i>Website</i> dan Media Sosial	49
3. Diseminasi Revolusi Mental ke Seluruh Pelosok Indonesia	50

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penelitian dan Publikasi Ilmiah	51
2. Pengembangan Profesi Bidang Komunikasi dan Informatika	53
3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pendekatan Ekosistem SKKNI	54
4. Penyelegaraan Beasiswa Paskasarjana Dalam dan Luar Negeri	55

KINERJA LAINNYA

1. Pengaduan Bidang Pers	56
2. Pengaduan Bidang Penyiaran	56
3. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	57
4. Rating Siaran Televisi (TV)	57
5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015	58

Daftar Tabel

Tabel 1.1 : Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015	12
Tabel 1.2 : Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015	12
Tabel 3.1 : Lokasi yang Sudah Tersambung Internet	30
Tabel 3.2 : Hasil penilaian PeGI tahun 2009-2015	37
Tabel 3.3 : Jumlah Penapisan Situs Negatif	43
Tabel 3.4 : Jumlah Pengaduan Bidang Penyiaran	54
Tabel 3.5 : Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV	55

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Area operasi PT Pos Indonesia	10
Gambar 1.2 : Sebaran pelayanan pos bergerak PT. Pos Indonesia tahun 2013	10
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kemkominfo	16
Gambar 2.2 : Program Utama Kemkominfo	18
Gambar 3.1 : Proses Registrasi dan Kelengkapan Administrasi Pemohon	22
Gambar 3.2 : Penataan Pita Frekuensi 1.800 MHz	24
Gambar 3.3 : Peresmian Tugu Berkode Pos	30
Gambar 3.4 : Peta Lokasi Pembangunan Tugu Pos tahun 2015	30
Gambar 3.5 : Model Bisnis Penyediaan Akses Internet	31
Gambar 3.6 : Sebaran Lokasi Akses Internet Berdasarkan Wilayah	32
Gambar 3.7 : Model Pembangunan Desa Broadband Terpadu	33
Gambar 3.8 : Element Infrastruktur	34
Gambar 3.9 : Struktur kerja sama proyek Palapa Ring	36
Gambar 3.10 : Peta Palapa Ring 2015	37
Gambar 3.11 : Peta Lokasi ITTS phase II	38
Gambar 3.12 : Prospek Bisnis E-Commerce di Indonesia	40
Gambar 3.13 : <i>Roadmap E-Commerce</i> Indonesia	41
Gambar 3.14 : SKKNI dan RSKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika	53
Gambar 3.15 : Alur Penerimaan Beasiswa S2 Luar Negeri	55
Gambar 3.16 : Indeks kualitas siaran per program siaran	58



KILAS KINERJA 2015

BAB
1



Peristiwa Penting Tahun 2015
Highlight Kemkominfo
Statistik Bidang Kominfo

PERISTIWA PENTING TAHUN 2015



9 / Februari / 2015

Peringatan Hari Pers Nasional

6 / April / 2015

Forum penanganan situs internet bermuatan negatif



19-21 / April / 2015

Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60.

19 / Mei / 2015

Peresmian Percepatan Pelayanan Perizinan Fekkuensi Radio Berbasis *Machine to Machine* (M2M).



15-16 / Juni / 2015

Festival Desa TIK (DesTIKa)

10 / Agustus / 2015

Peluncuran Perangko 48th ASEAN DAY Celebration



28-29 / Oktober / 2015

Kunjungan ke silicon valley.



11 / Desember / 2015

Launching 4G LTE Revolusi Digital.





1. **Highlight Capaian Kinerja KEMKOMINFO 2015**

Dalam bidang infrastruktur, Kemkominfo telah berhasil menyediakan



2. Highlight Laporan Keuangan

Realisasi Anggaran Kemkominfo 2015

Pendapatan Negara

Pendapatan
pengelolaan
Barang Milik
Negara

Rp **2,4** miliar

Pendapatan
Iuran dan Denda

Rp **487** juta

Pendapatan
Jasa

Rp **14,6** triliun

Pendapatan
Lain-lain

Rp **4,8** miliar

Pendapatan
Kejaksaan &
Peradilan dan
Hasil Tindak
Pidana Korupsi

Rp **26** juta

Pendapatan
Jasa Layanan
Umum

Rp **2,7** triliun

Pendapatan
Pendidikan

Rp **11,8** miliar

Pendapatan
Badan Layanan
Umum

Rp **6,8** miliar



Total Pendapatan Negara

Rp **17,420** triliun

Highlight Kemkominfo

Pagu Kemkominfo 2015 Rp **4.939** triliun

Belanja Negara

Rupiah Murni

Rp **1,1** triliun

Badan Layanan Umum

Rp **366** miliar

Pinjaman Luar Negeri

Rp **306** miliar

Hibah Luar Negeri

Rp **1,8** miliar

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Rp **851** miliar

Hibah Langsung Luar Negeri

Rp **763** juta

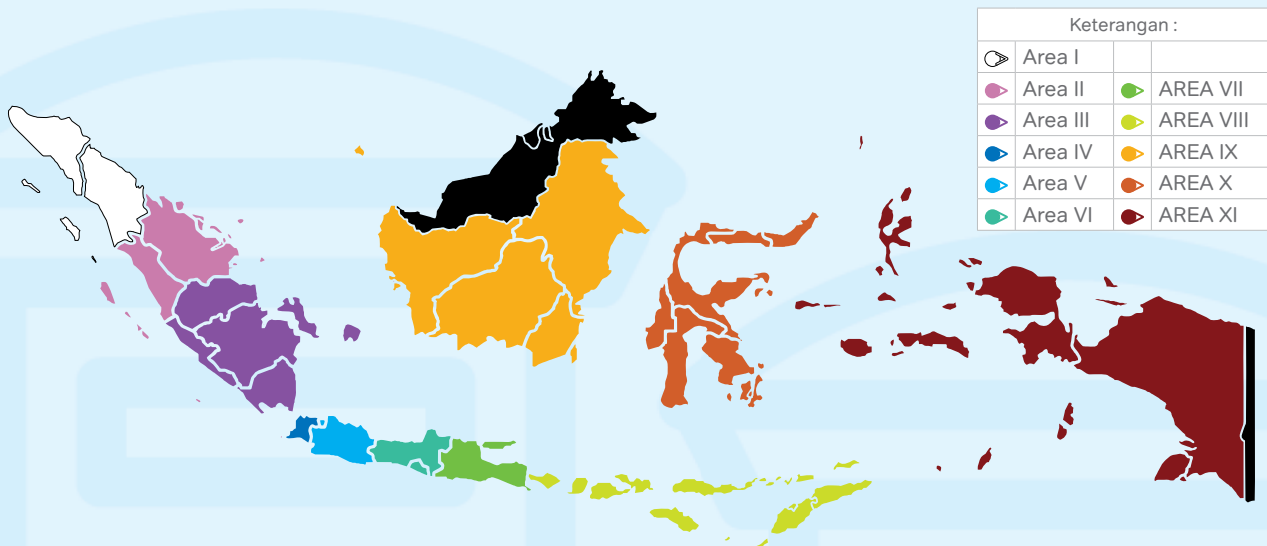


Total Belanja Negara

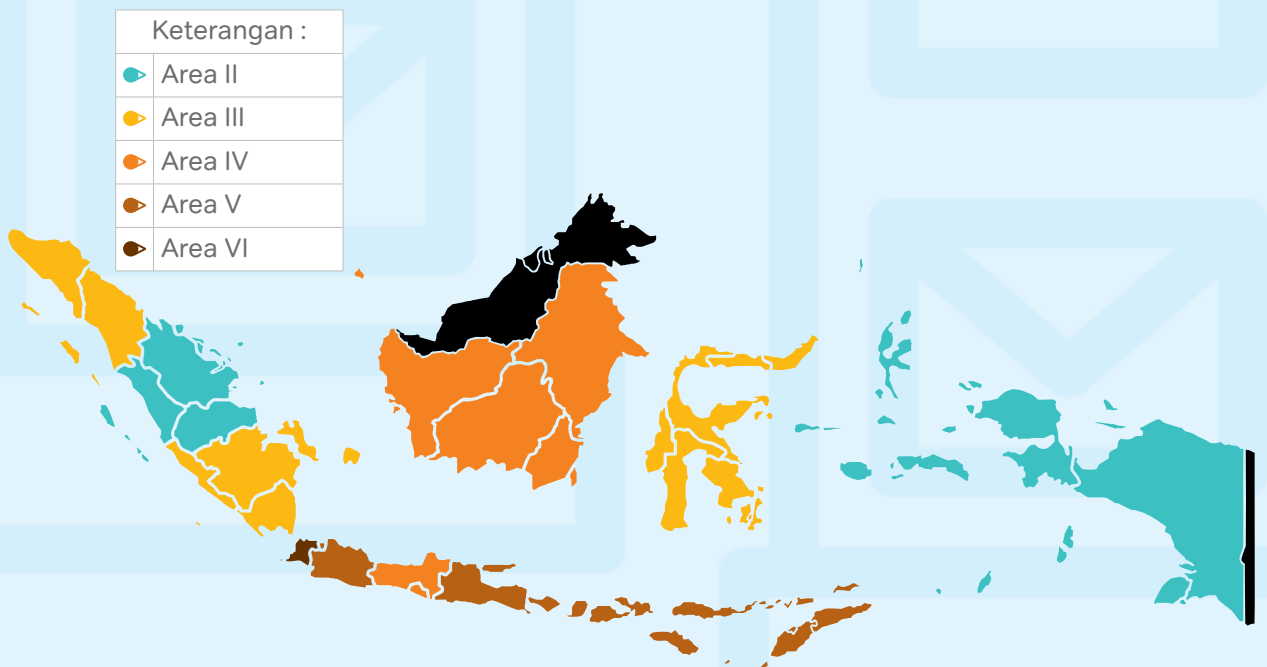
Rp **2,678** triliun

STATISTIK BIDANG KOMINFO

1. Penyelenggaraan Pos



Gambar 1.1 : Area operasi PT Pos Indonesia



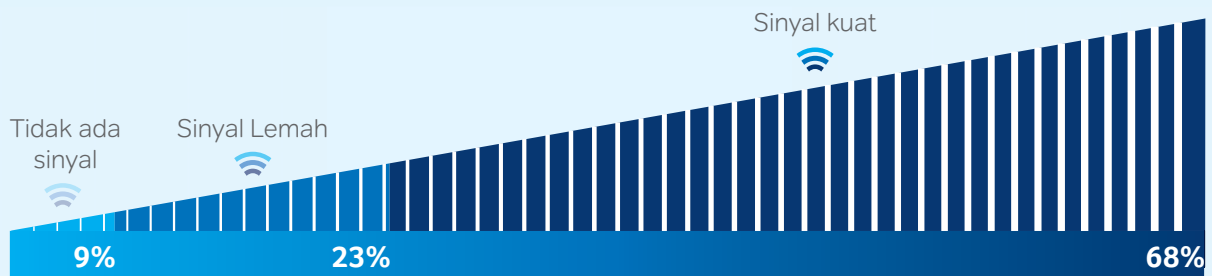
Gambar 1.2 : Sebaran pelayanan pos bergerak PT. Pos Indonesia tahun 2013

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014

Statistik Bidang Kominfo

2. Jangkauan Sinyal

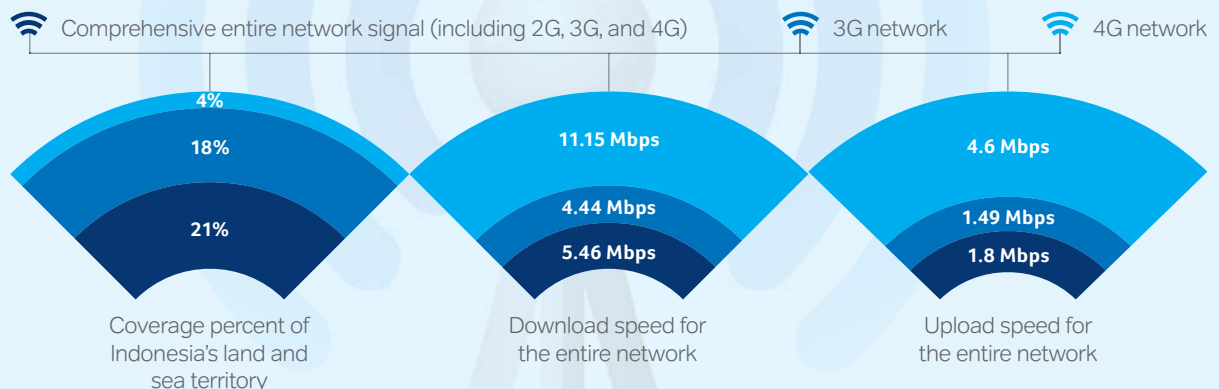
Menurut sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2014, 91% wilayah di Indonesia sudah terdapat sinyal telepon, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

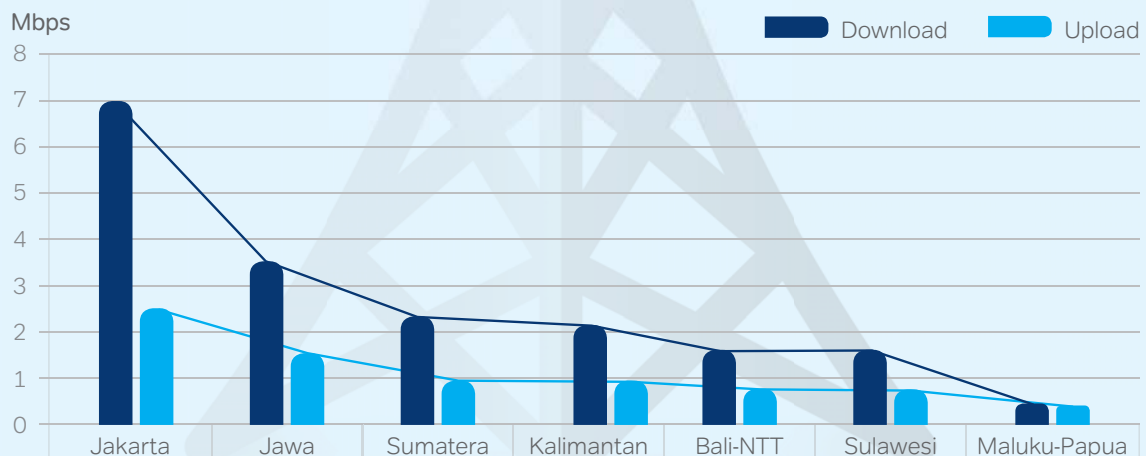
Jangkauan Kecepatan Sinyal di Wilayah Indonesia

Signal Type



Sumber: opensignal.com, 2016

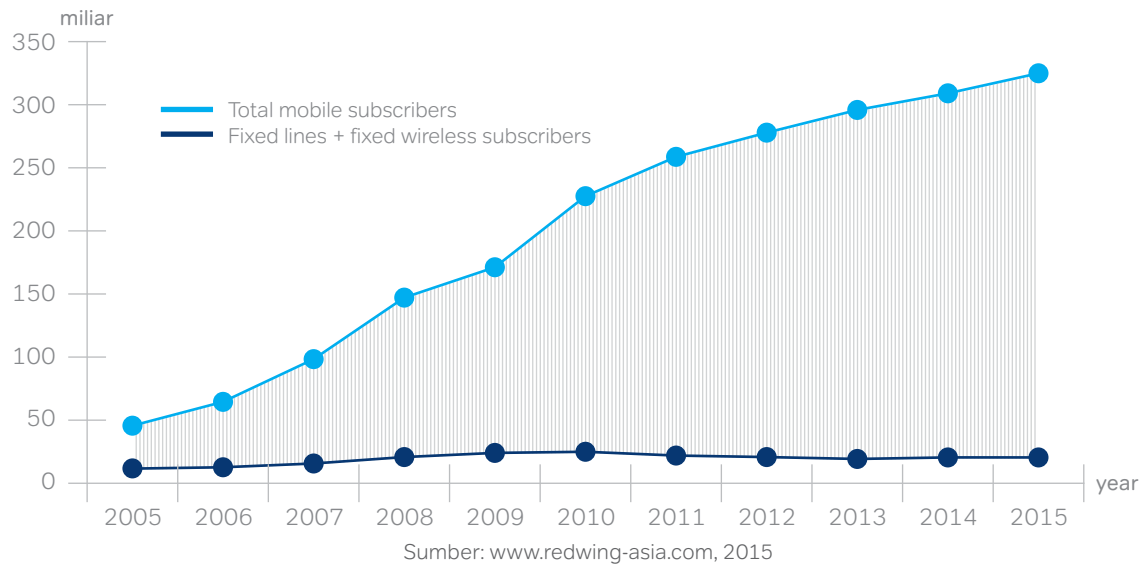
Kecepatan Rata-Rata Jaringan Seluler di Indonesia



Sumber: Cellular and Broadband Indonesia Coverage Study by UP2M

Statistik Bidang Kominfo

3. Pertumbuhan Telepon Seluler di Indonesia



Panggilan Telepon dan SMS menurun, tetapi penggunaan data meningkat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Total Subscriptions (in millions)

	Cellular	Fixed	Fixed Wireless Access
2008	140.5	8.7	21.7
2009	163.7	8.4	26.4
2010	211.3	8.4	32.6
2011	249.8	8.7	29.4
2012	282.0	7.7	29.8
2013	313.2	10.0	18.5
2014	325.6	9.9	16.3

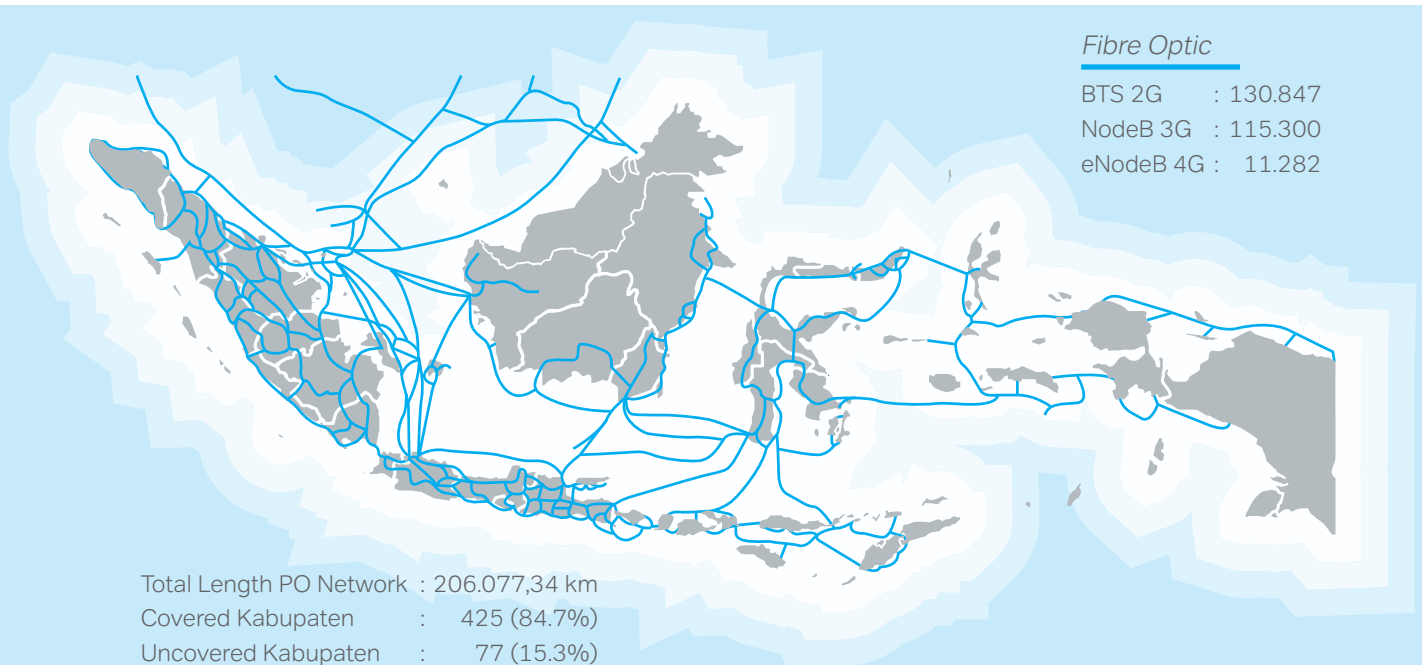
Sumber: www.redwing-asia.com, 2015

	Traffic Voice Minute per month per subscriber	Traffic Data per month per subscriber	Traffic SMS O/G per month per subscriber
Q3/2015	102	225	138
2014	108	138	160
2013	116	60	200

Sumber : GSMA Intelligence 2015

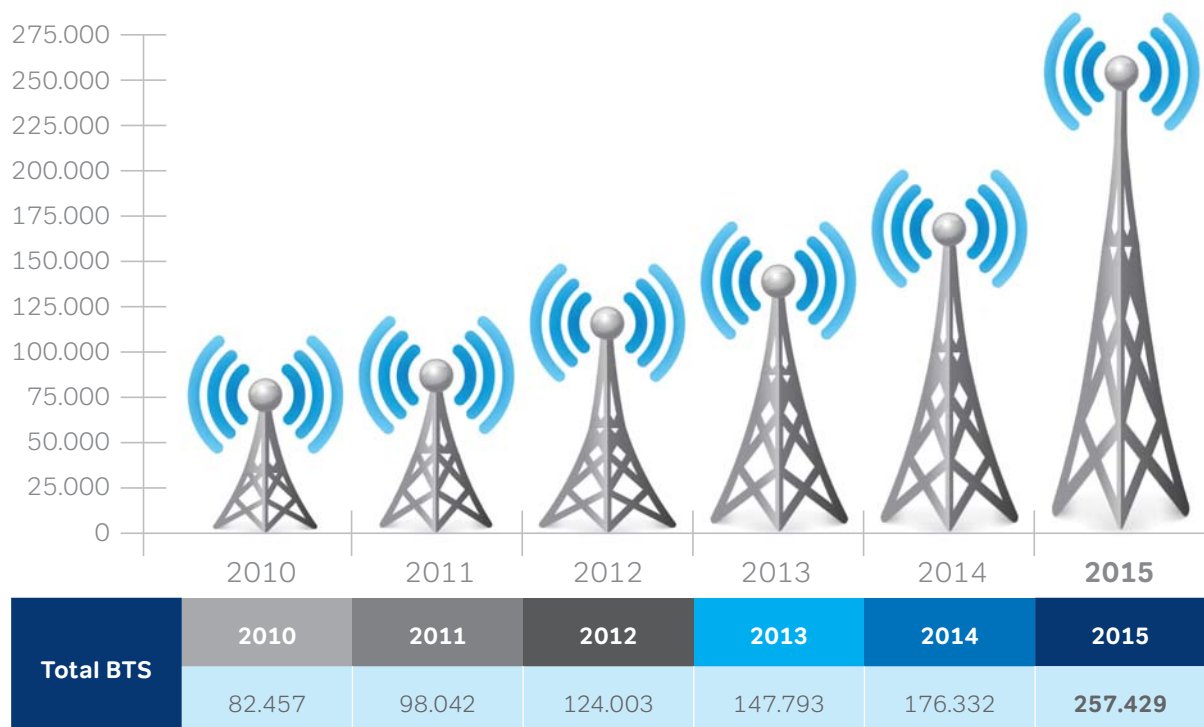
Statistik Bidang Kominfo

Peta Jaringan Telepon Seluler dan Jaringan Serat Optik



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Jumlah Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun dari tahun 2010-2015



sumber : LKO dan SIMF data

Statistik Bidang Kominfo

4. Peran Bidang Informasi dan Informatika dalam Pendapatan Nasional

Capaian TKDN Capex Tahun buku 2012 dari self assessment dan hasil verifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggaraan 3G, yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telekom, HCPT dan Indosat.

Tabel 1.1 : Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
						Q*	Q**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,93	13,64	13,45	13,28	13,17	13,12	13,91
Pertambangan dan Pengalihan	10,46	10,28	9,99	9,62	9,21	8,74	8,21
Industri Pengolahan	22,04	22,06	21,97	21,75	21,67	21,72	21,73
Pengadaan Listrik dan Gas	1,06	1,05	1,09	1,09	1,09	1,05	1,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	9,13	9,38	9,42	47	9,65	9,58	9,52
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	13,46	13,90	13,82	13,71	13,68	13,49	13,51
Transportasi dan Pergudangan	3,57	13,65	13,68	13,78	13,89	13,93	13,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,92	2,94	2,95	2,99	3,01	3,04	2,98
Informasi dan Komunikasi	3,73	3,87	4,09	4,28	4,48	4,73	4,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,52	3,64	3,76	3,75	3,88	3,69
Real Estate	2,89	2,93	2,97	2,99	2,99	3,07	2,99
Jasa Perusahaan	1,44	1,49	1,51	1,54	1,61	1,67	1,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,79	3,65	3,54	3,46	3,45	3,34
Jasa Pendidikan	2,94	2,95	3,01	3,09	3,12	3,09	3,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	0,97	1,00	1,01	1,04	1,07	1,07	1,06
Jasa Lainnya	1,47	1,50	1,50	1,51	1,56	1,63	1,60
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	97,37	97,01	97,84	97,50	97,50	97,32	97,06
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	2,63	1,99	2,16	2,50	2,50	2,68	2,94
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : * Angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

** Angka sangat sementara

5. Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Tabel 1.2 : Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi tahun 2008-2015

Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (kg)	Nilai (US\$)	Berat (kg)
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.492
210	2.310.105.995	56.333.735	3.619.695.162	62.600.497
2011	2.681.090.192	66.745.199	4.246.802.605	55.264.763
2012	1.284.076.360	28.578.023	3.893.105.777	51.044.989
Semester 1-2013	669.116.102	13.767.983	2.035.674.327	22.676.997
Semester 1-2013	485.887.207	10.843.837	2.022.716.088	20.334.297
Semester 1-2014	350.710.403	7.124.544	3.021.832.445	26.080.680
Semester 1-2014	777.375.750	14.926.725	5.792.440.367	55.428.205
Semester 1-2015	412.712.899	8.480.731	2.456.965.404	27.040.139

Keterangan : * Angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

** Angka sangat sementara



PROFIL KEMENTERIAN

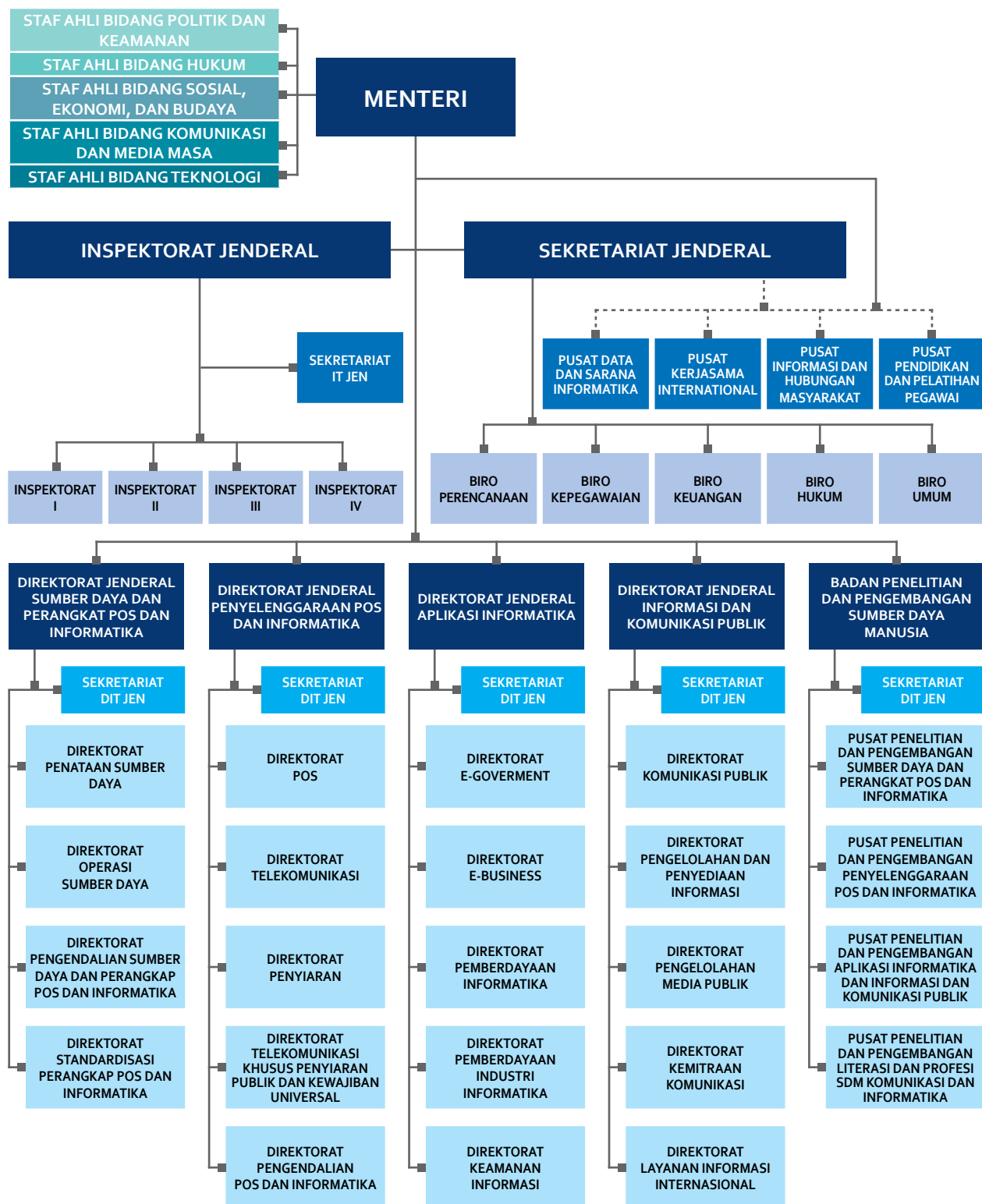
BAB 2



Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika

STRUKTUR ORGANISASI

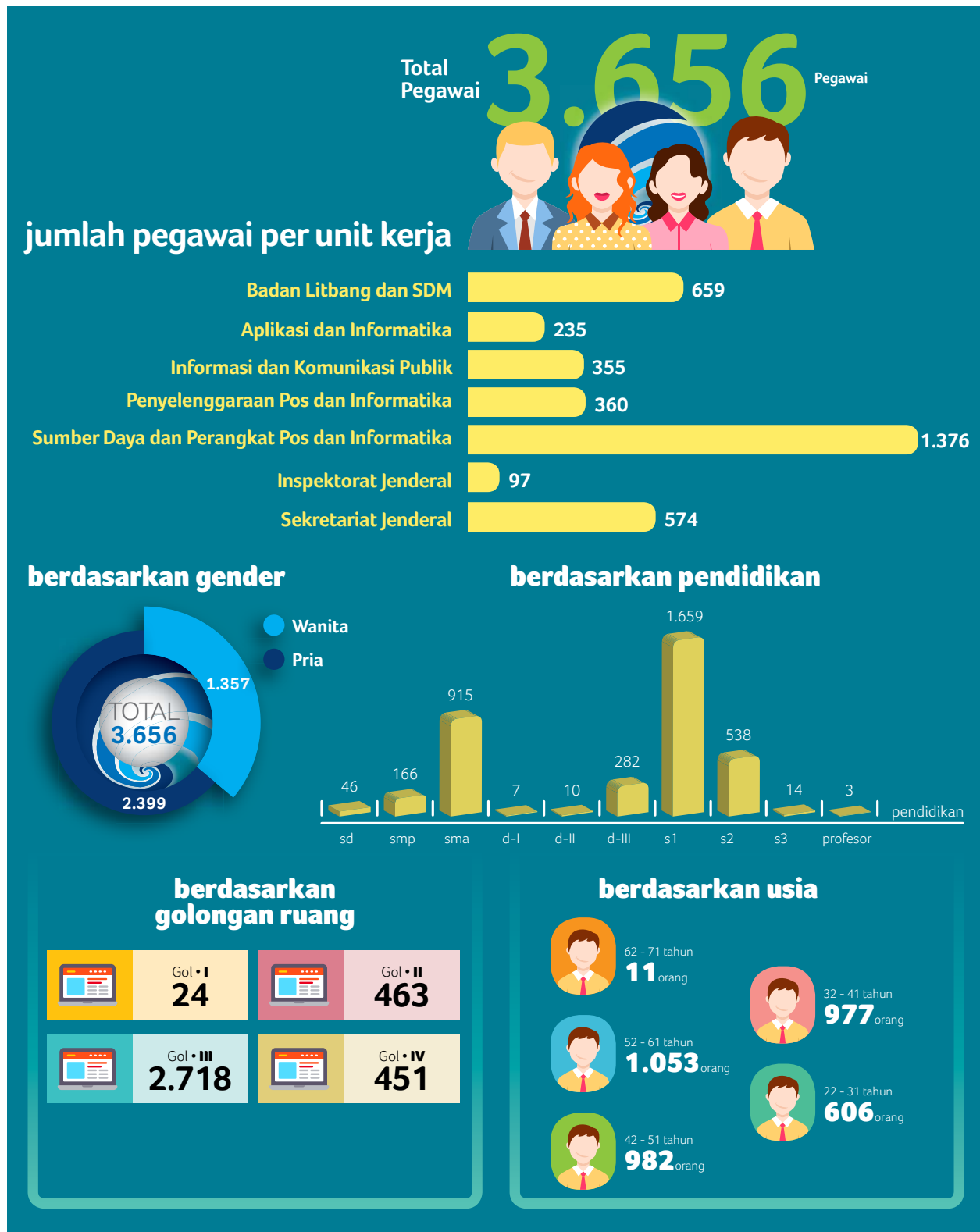
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kemkominfo

SUMBER DAYA MANUSIA

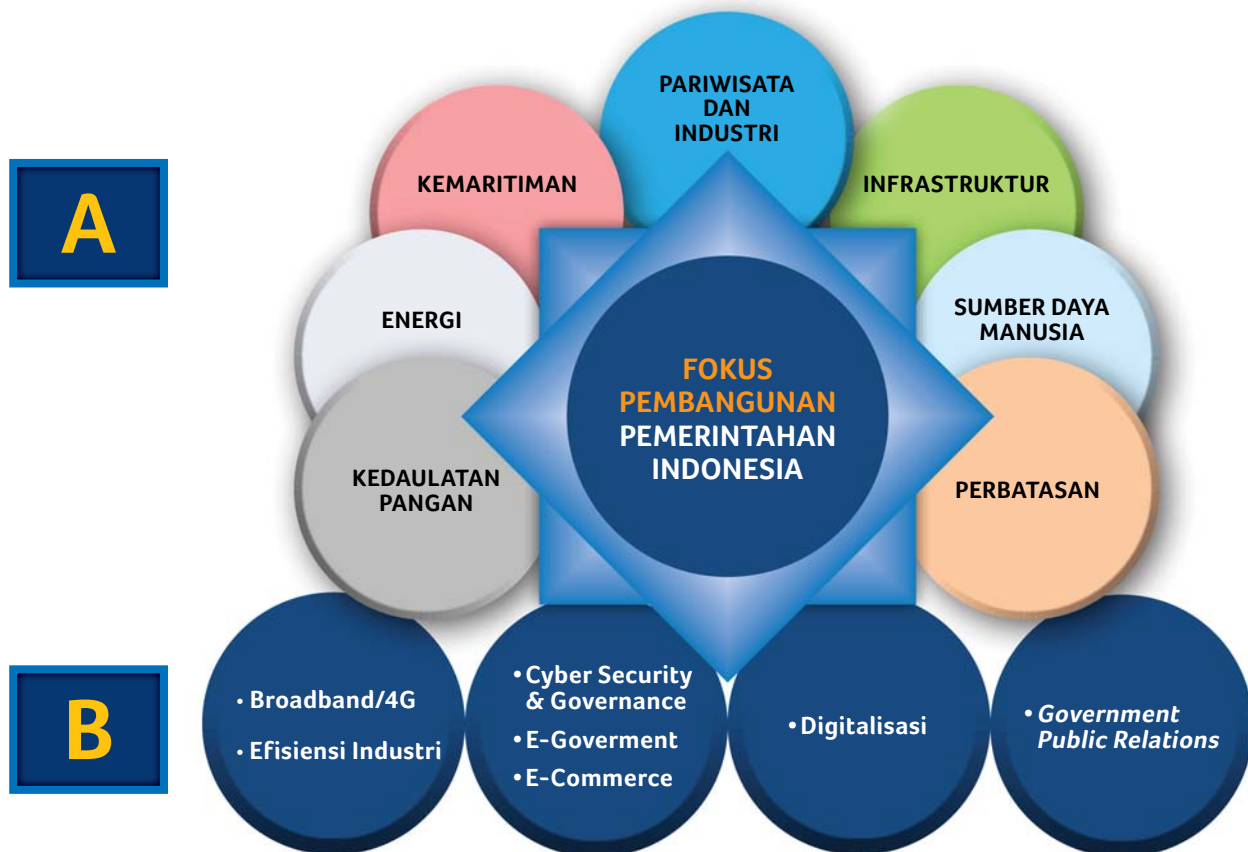
Komposisi Sumber Daya Manusia KEMKOMINFO



PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Progran Utama Kemenkominfo

Berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara.



Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 - 2019

Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Gambar 2.2 : Program Utama Kemkominfo



KINERJA KEMENTERIAN

BAB
3



Pelayanan Publik dan Penciptaan *Good Governance*
Kebijakan
Pembangunan Infrastruktur
Tata Kelola Internet
Government Public Relations dan Diseminasi Informasi
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kinerja Lainnya



PELAYANAN PUBLIK DAN PENCIPTAAN *GOOD GOVERNANCE*

1. Penyederhanaan Proses Perizinan

Untuk Pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik

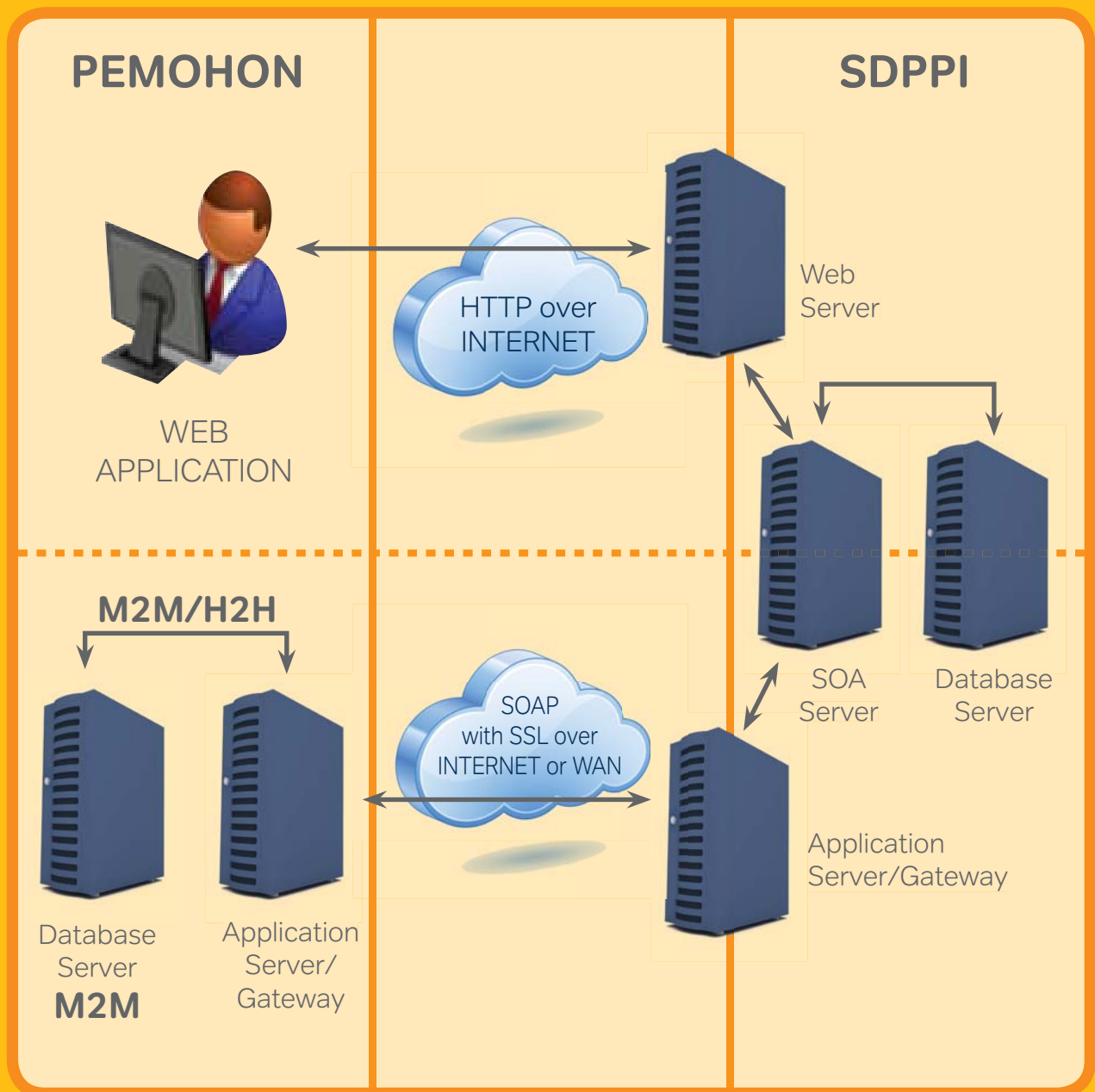
8 Peraturan Menkominfo diubah dalam rangka reformasi perizinan:

1. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dari **60 hari** menjadi **14 hari kerja**.
2. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari **60 hari** menjadi **14 hari kerja**.
3. Izin Stasiun Radio (ISR) berbayar :
 - Untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja
 - Untuk yang perpanjang dari **7 hari kerja** menjadi **3 hari kerja**.
4. Izin Stasiun Radio yang tidak berbayar dari **14 hari kerja** menjadi **7 hari Kerja**.
5. Izin Amatir Radio dari **14 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.
6. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dari **28 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.
7. Sertifikat Alat dan perangkat telekomunikasi:
 - Melalui pengujian dari **30 hari kerja** menjadi **23 hari kerja**
 - Melalui evaluasi dokumen dari **10 hari kerja** menjadi **7 hari kerja**.
8. Penyelenggaraan Pos baik Nasional, Propinsi maupun Kab/Kota, proses perizinan dari **14 hari kerja** menjadi **10 hari kerja**.



≡ Pelayanan Publik dan Penciptaan *Good Governance*

Penggunaan Sistem *Machine-to-Machine* oleh Operator Seluler

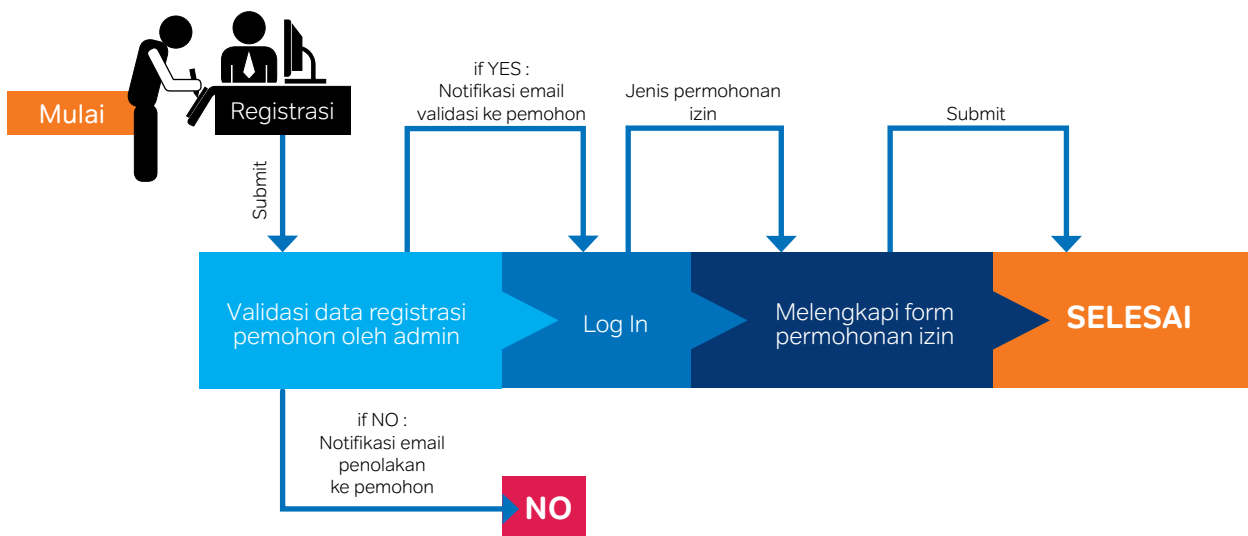


2. Sistem Perizinan Telekomunikasi dan Pos (E-Licensing)

Tujuan Sistem Perizinan Online



Alur proses Pemohon dalam Sistem Perizinan



Gambar 3.1 : Proses Registrasi dan Kelengkapan Administrasi Pemohon

≡ Pelayanan Publik dan Penciptaan *Good Governance*

3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penciptaan *Good Governance*

Untuk mencegah dan memberantas Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menciptakan beberapa upaya untuk mendukung hal tersebut. Beberapa upaya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS)

Whistle Blowing System merupakan bagian dari aksi atau upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperhatikan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistle Blowing System*.

Di dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang *akuntable* Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi WBS dengan memanfaatkan aplikasi dari LKPP dan menjalankan aplikasi WBS tersendiri yaitu (<http://wbs.kominfo.go.id>) dan kotak surat elektronik untuk pengaduan WBS di wbs@mail.kominfo.go.id.

b. Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka mendukung penerapan Pengawasan Masyarakat (Wasmas), Kemkominfo telah memfasilitasi media pengaduan yang berasal dari masyarakat luas (dumas) secara online yang bisa diakses melalui website (<http://dumas.kominfo.go.id>) dan alamat email dumas@mail.kominfo.go.id.

KEBIJAKAN

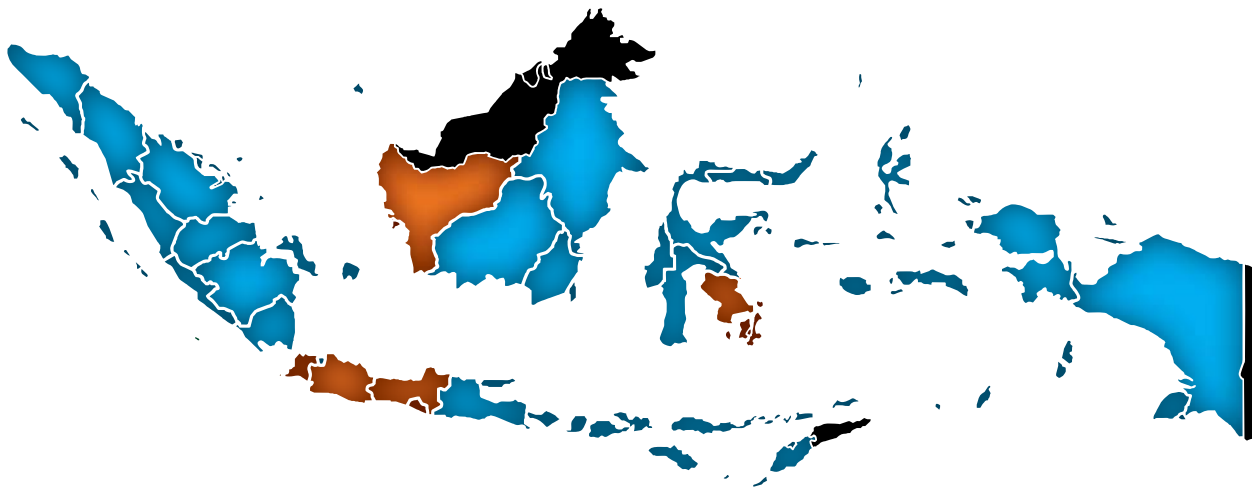
1. Penataan Pita 1.800 MHz

42 wilayah **Indonesia**
kini bisa menikmati **4G LTE**



Dengan berakhirnya keseluruhan proses migrasi di Jabodetabek pada akhir November 2015, diharapkan dapat meningkatkan layanan Broadband 4G LTE di pita frekuensi 1.800 MHz dari sebelumnya 900 MHz sejak Desember 2014.

Penataan Pita Frekuensi 1.800MHz telah selesai di 42 wilayah/*cluster* Indonesia:



Gambar 3.2 : Penataan Pita Frekuensi 1.800 MHz

Daerah yang telah diterapkan penataan pita frekuensi 1.800 MHz.

- | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Papua | 10. Sulawesi Selatan | 19. Sumatera Utara 2 | 28. Bali | 37. Purwakarta |
| 2. Papua Barat | 11. Sulawesi Barat | 20. Sumatera Selatan | 29. JawaTimur | 38. Kalimantan Barat |
| 3. Maluku | 12. Aceh | 21. Lampung | 30. JawaTimur 2 | 39. Sukabumi |
| 4. Maluku Utara | 13. Kep. Riau | 22. Kep. Bangka Belitung | 31. JawaTimur 3 | 40. Banten |
| 5. Kalimantan Timur | 14. Riau | 23. Bengkulu | 32. Jawa Tengah 1 | 41. Jakarta 1 |
| 6. Kalimantan Utara | 15. Nusa Tenggara Barat | 24. Jambi | 33. Jawatengah 2 | 42. Jakarta 2 |
| 7. Kalimantan Selatan | 16. Nusa Tenggara Timur | 25. Sulawesi Utara | 34. Jawa Tengah 3 | |
| 8. Kalimantan Tengah | 17. Sumatera Barat | 26. Gorontalo | 35. Jawa Barat 1 | |
| 9. Sulawesi Utara | 18. Sumatera Utara 1 | 27. Sulawesi Tenggara | 36. Jawa Barat 2 | |

≡ Kebijakan

Tahapan dan mekanisme penataan pita 1.800 MHz ditetapkan dalam Peraturan Menteri no. 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1.800 Mhz untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

⌋ 2. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4G LTE

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8 Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar *Teknologi Long Term Evolution*:


1

Perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi **Long Term Evolution (LTE)** wajib memenuhi TKDN paling rendah 30% untuk *Base Station* dan paling rendah 20% untuk *Subscriber Station*.


2

Pada tanggal 1 Januari 2017 TKDN untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.100 MHz, 1.800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, yang wajib dipenuhi adalah paling rendah 40% untuk *Base Station* dan paling rendah 30% untuk *Subscriber Station*.


3

dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk Perangkat telekomunikasi LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.300 MHz, yang wajib dipenuhi adalah paling rendah 40% untuk *Base Station* dan paling rendah 30% untuk *Subscriber Station*.

≡ Kebijakan

3. Kebijakan Kartu Prabayar



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

1. Pastikan tanda pengenal Anda tidak di *fotocopy* oleh petugas *outlet*.
2. Registrasi harus dilakukan di *outlet* resmi.
3. *Outlet* yang tidak memiliki poster ini bukanlah *outlet* kami.

Himbauan ini mengacu Surat Edaran BRTI No. 161/BRTI/V2014

≡ Kebijakan

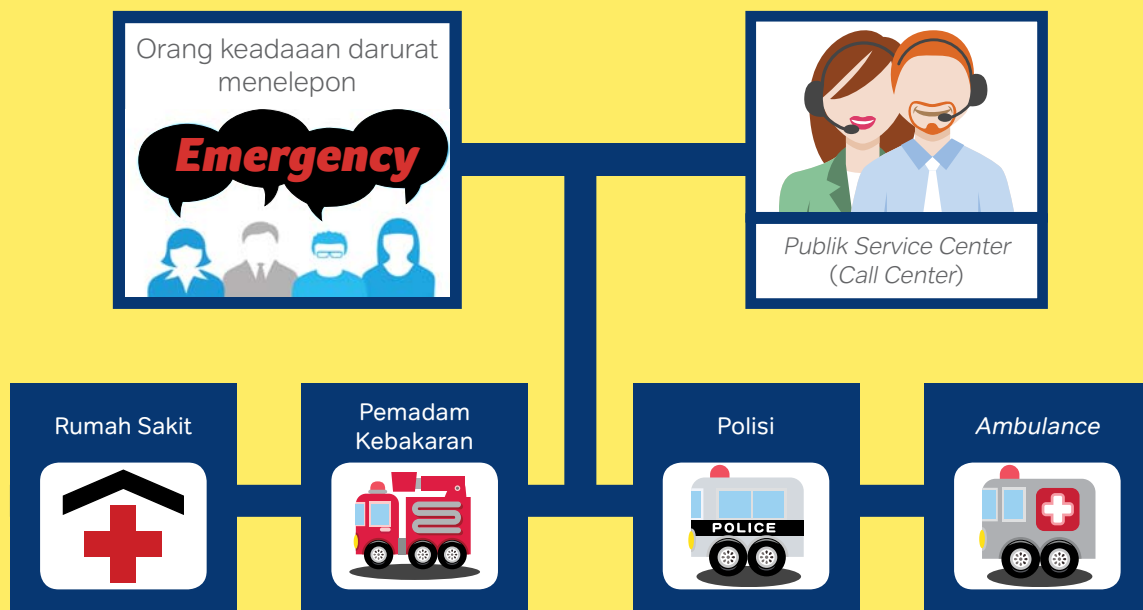
(((4. Nomor Panggilan Tunggal Darurat (*Single Emergency Number*)

Di Indonesia, terdapat banyak nomor telepon darurat serta layanan informasi yang dapat di hubungi bebas biaya, namun layanan panggilan darurat di Indonesia masih berdiri sendiri sesuai dengan peruntukan masing-masing, seperti:

- Ambulance = 118 atau 119,
- Polisi = 110, Pemadam
- Kebakaran = 113 atau 1131, serta
- *Search and Rescue* (SAR)= 115.

Saat ini Pemerintah berencana memadukan semua layanan itu dalam satu nomor layanan terpadu. *Public Service Centre* Layanan Tunggal Darurat. Dengan kehadiran *Public Service Centre* ini setiap masyarakat diharapkan bisa dilayani secara, maksimal, meskipun dalam kondisi darurat.

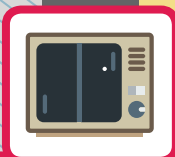
Untuk program *Single Emergency Call* ini telah dilaksanakan FGD dengan perwakilan 10 Pemda Kab/Kota sebagai *Pilot Project* dan penandatanganan *Perjanjian Kerja Sama* pada Oktober 2015.



5. Migrasi TV Analog ke TV Digital

Pemerintah merencanakan siaran analog akan dimatikan pada 2018

Manfaat Penyiaran Digital:



Kualitas gambar & suara lebih baik



Menumbuhkan industri konten nasional & lokal di industri kreatif



Efisiensi infrastruktur sebesar 75% biaya operasional lembaga



Roadmap Infrastruktur TV Digital



75%-100% (2018)
50%-75% (2015)
0%-50% (2010-2014)

≡ Kebijakan

6. Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara

Tahun 2015 terbit Permen Kominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Terbitnya Permen Kominfo nomor 5 Tahun 2015 menjadi awal Reformasi Tata Kelola Domain Pemerintah. Permen ini memberikan kewenangan Kemkominfo sebagai Registrar Nama Domain Pemerintah.

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi :

- Pendaftaran Nama Domain
- Penggunaan Nama Domain
- Penonaktifan Nama Domain
- Perpanjangan Nama Domain
- Penunjukan Pejabat Nama Domain
- Perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain
- Server Nama Domain

7. Mekanisme Partisipasi Publik

Permen Kominfo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Partisipasi Publik Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

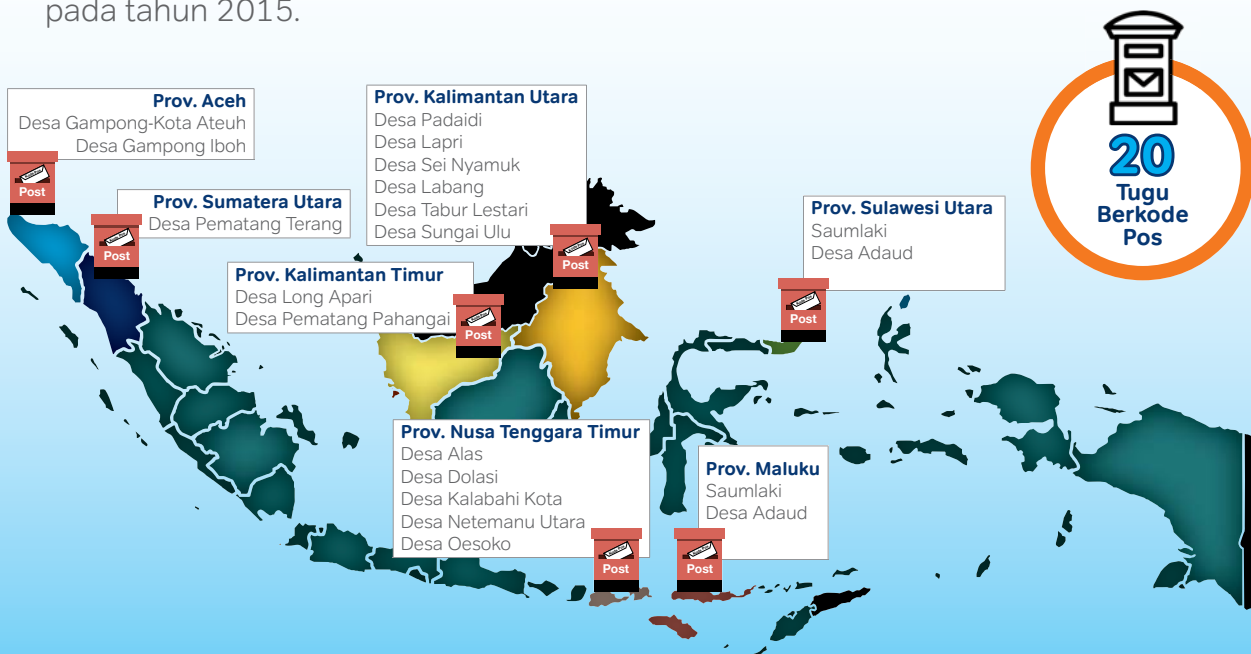
1. Pembangunan Sarana / Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan di Indonesia

Pembangunan sarana/tugu berkode pos memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memudahkan dalam meningkatkan layanan pos. Adanya tugu tersebut dapat mengurangi adanya sengketa batas wilayah sehingga keutuhan wilayah NKRI dapat terus terjaga.



Gambar 3.3 : Peresmian Tugu Berkode Pos

Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan telah dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015.

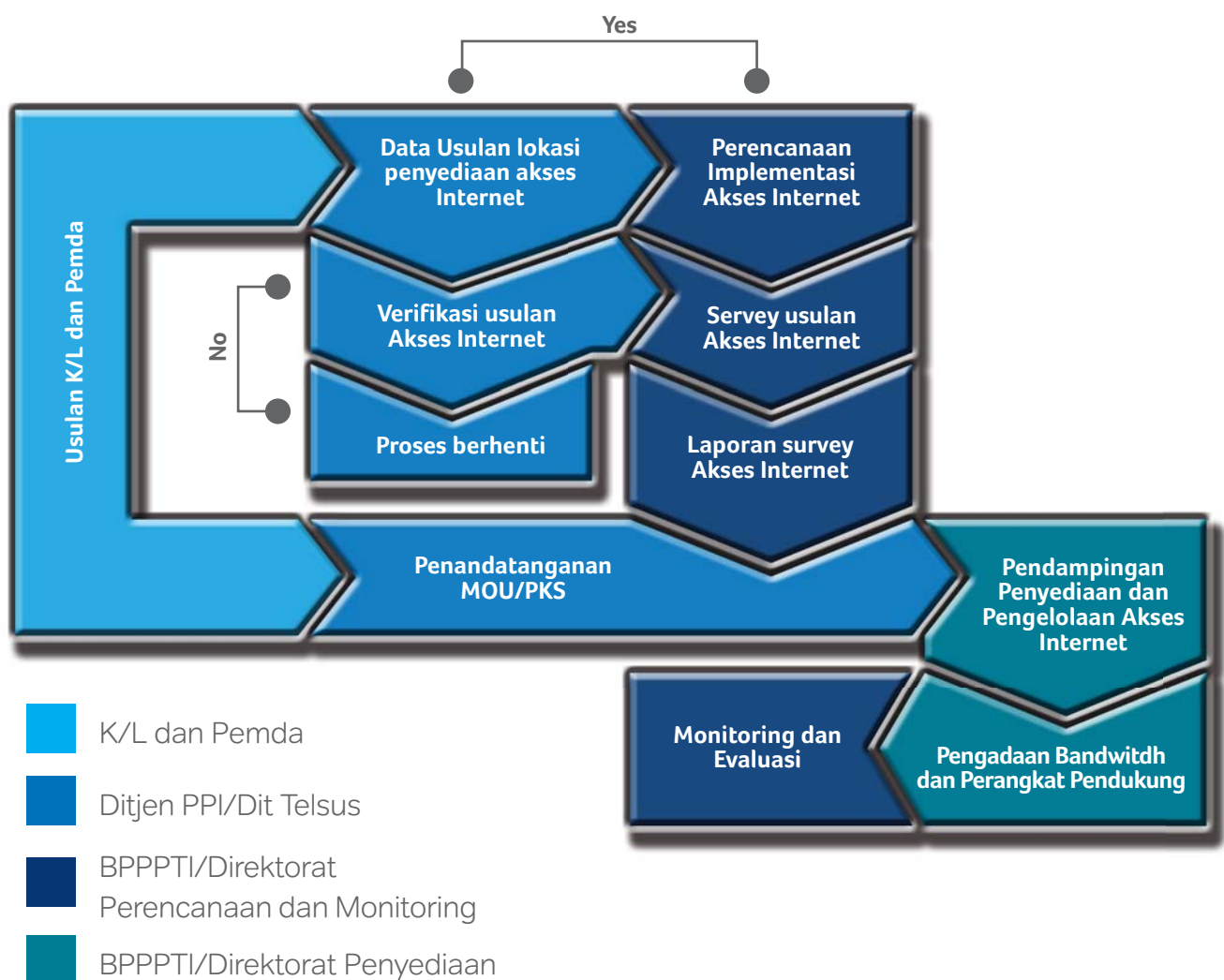


Gambar 3.4 : Peta Lokasi Pembangunan Tugu Pos tahun 2015

≡ Pembangunan Infrastruktur

2. Penyediaan Akses Internet

Program Penyediaan Jasa Akses Internet merupakan program penyediaan infrastruktur dan/atau akses internet dengan kapasitas bandwidth minimal 2Mbps. Solusi teknologi untuk penyediaan jasa akses internet ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis di daerah. Secara umum solusi teknologi yang dipilih dalam Penyediaan Jasa Akses Internet mencakup *fiber optic*, *radio link* dan *Vsat (Very Small Aperture Terminal)*.



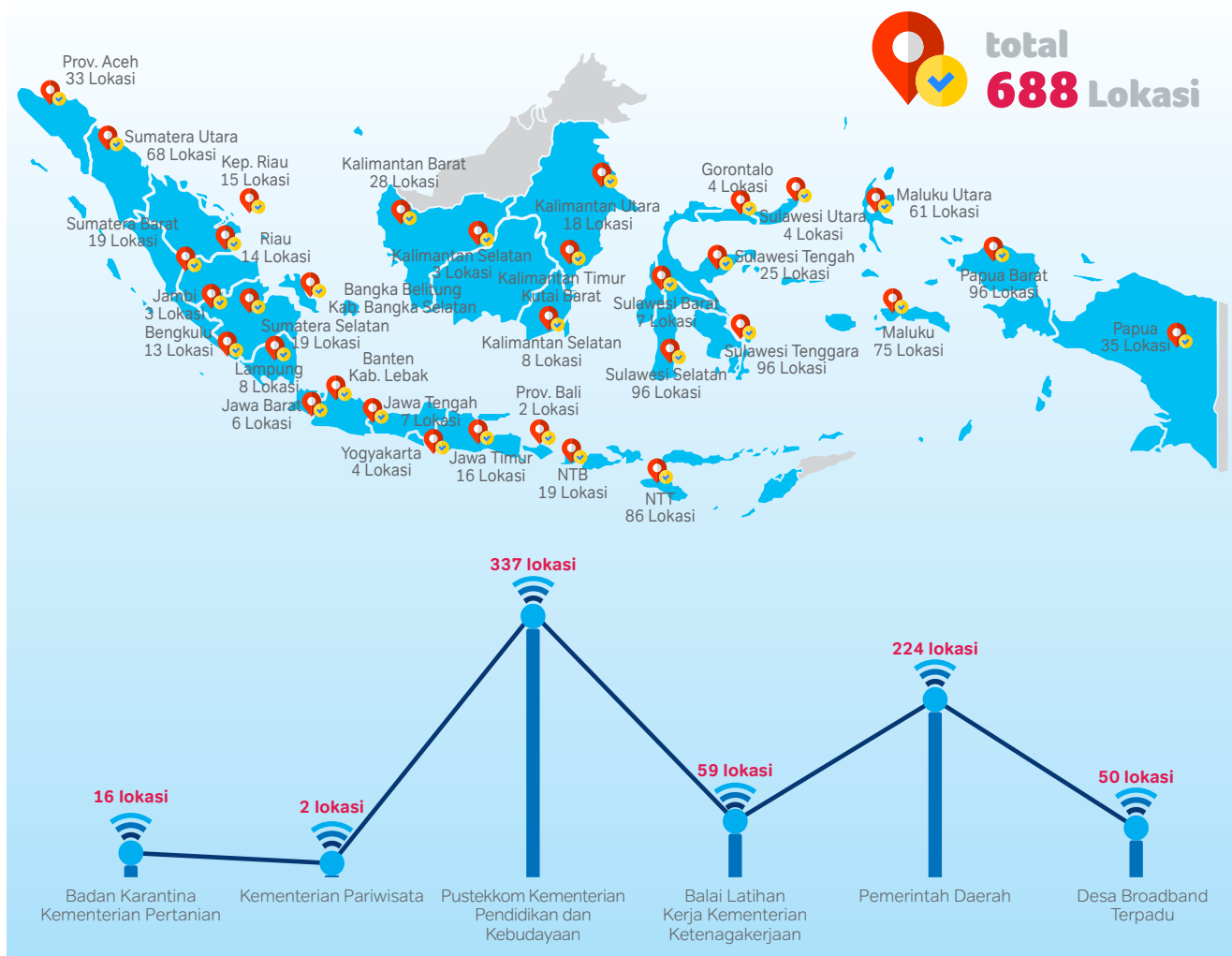
Gambar 3.5 : Model Bisnis Penyediaan Akses Internet

Pembangunan Infrastruktur

Pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil menyediakan jasa akses internet di 688 titik lokasi.

Tabel 3.1 : Lokasi yang Sudah Tersambung Internet

No	Pengusul	Live / Connected
1	Badan Karantina Kementerian Pertanian	16 lokasi
2	Kementerian Pariwisata	2 lokasi
3	Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	337 lokasi
4	Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	59 lokasi
5	Pemerintah Daerah	224 lokasi
6	Desa Broadband Terpadu	50 lokasi
Jumlah		688 lokasi



Gambar 3.6 : Sebaran Lokasi Akses Internet Berdasarkan Wilayah

≡ Pembangunan Infrastruktur

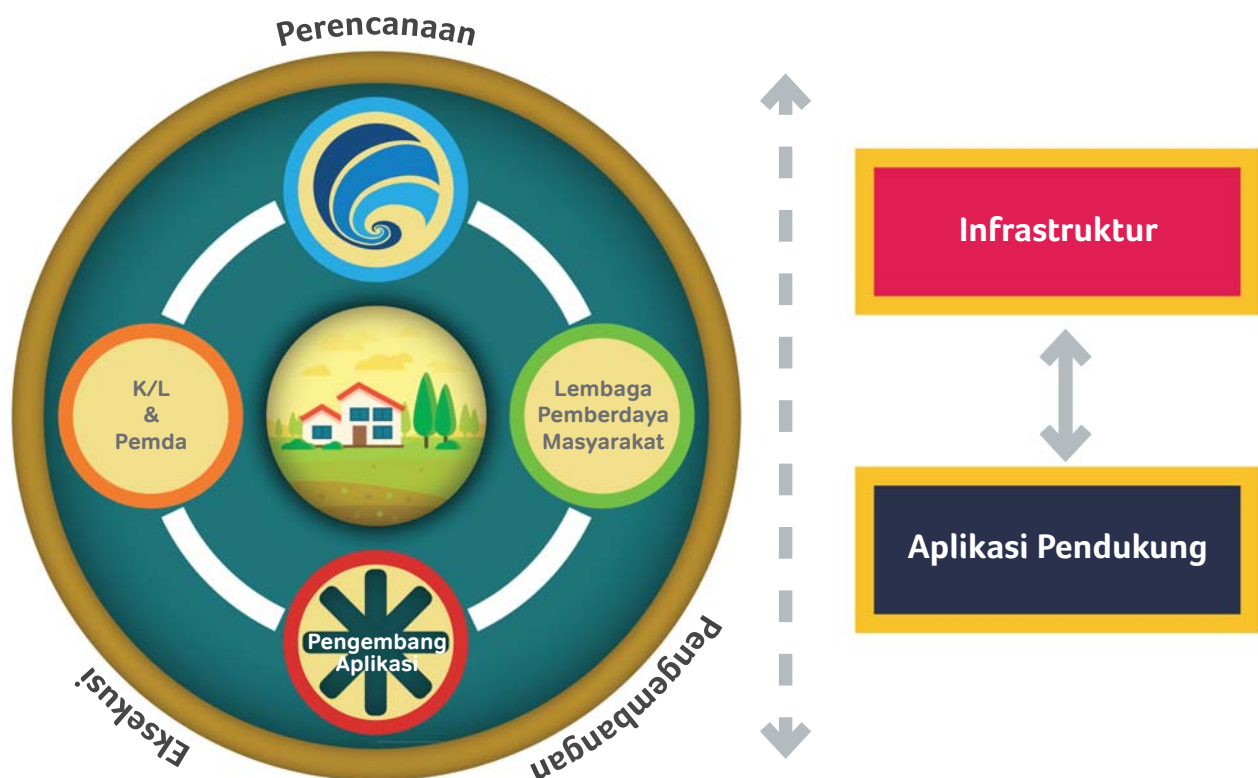
3. Penyediaan Sistem Desa Broadband terpadu

Mengapa disebut Broadband?

Desa-desa tersebut akan diperkuat dengan layanan akses internet dengan kecepatan 2Mbps, sebagai pintu akses internet di pedesaan.

Terpadu?

Terpadu disini berarti program ini dilaksanakan secara terpadu dari 2 sisi yaitu terpadu secara proses, dan terpadu secara sistem



Gambar 3.7 : Model Pembangunan Desa Broadband Terpadu

Program tersebut diperuntukkan bagi desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan masyarakat setempat sehari-hari.

≡ Pembangunan Infrastruktur

Keterpaduan Aplikasi

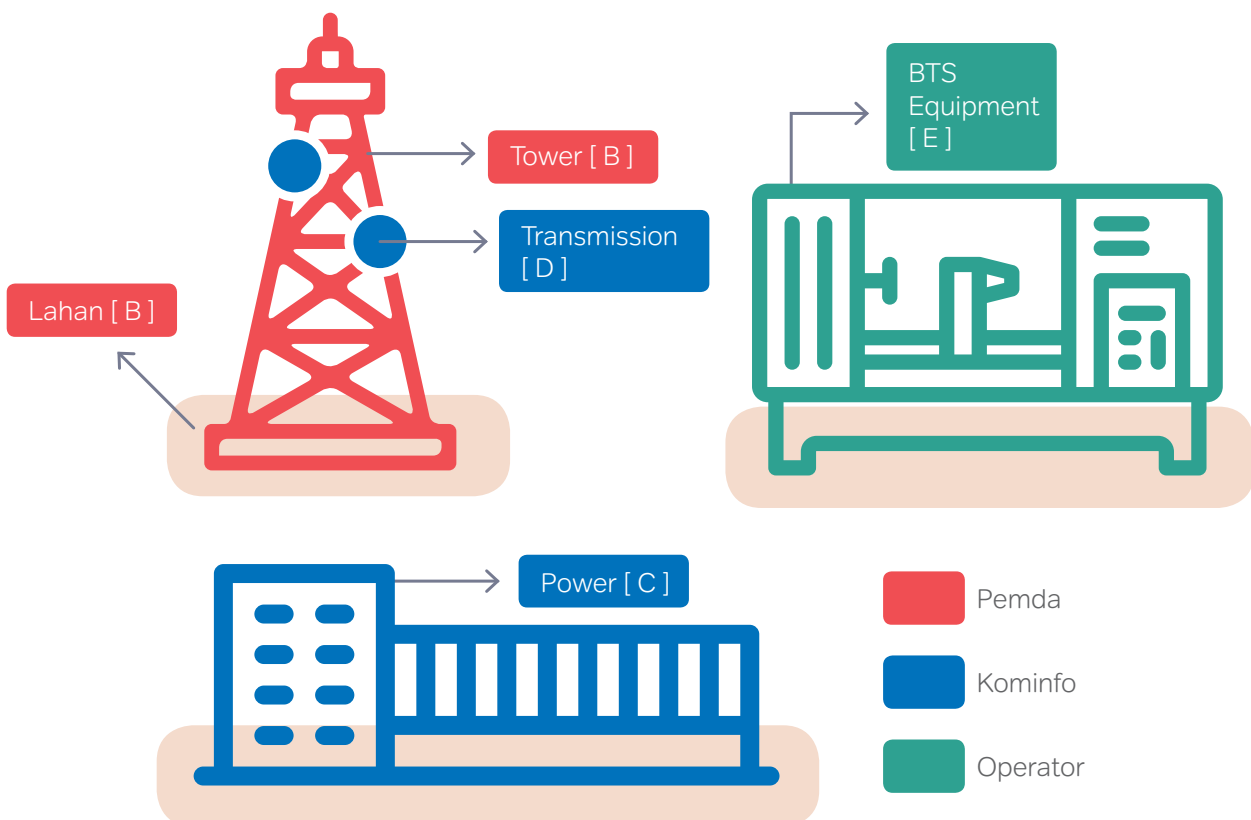
Saat ini telah dibangun Portal Aplikasi Pedesaan yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan pengembang aplikasi lokal yang dapat diakses pada broadband-desa.go.id. Dalam portal tersebut tersedia berbagai macam aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa, baik itu untuk pekerjaan, seperti informasi cuaca, harga komoditi.

Pengembangan Non Infrastruktur

Dimulai dengan ToT (*training of trainer*) kepada perwakilan Pemda dan warga, diharapkan keberlanjutan training akan dilaksanakan di daerah masing-masing dan menjadi rantai yang menciptakan ekosistem IT di desa-desa.

« 4. Penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*)

Pelaksanaan penyediaan BTS di daerah perbatasan yang merupakan amanat dari Nawacita, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi.



Gambar 3.8 : Element Infrastruktur

≡ Pembangunan Infrastruktur

Dengan adanya program pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi, diharapkan dapat mendukung sasaran strategis ketersediaan layanan komunikasi dan informatika sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan.

Penyediaan BTS hingga Desember 2015 terletak di:

1. SETARAP (Kalimantan Utara, Long : 116.507136 Lat : 3.406875)
2. YURUF (Papua, Long : 140.904867 Lat : - 3.607667)
3. KIABU (Kepulauan Riau, Long : 106.199839 Lat : 2.79075)
4. TELAGA (Kepulauan Riau, Long : 105.969081 Lat : 3.0487)
5. REWAK (Kepulauan Riau, Long : 105.693417 Lat : 3.057783)

Sedangkan untuk Tiga (3) repeater telah on air, yaitu di :

1. Muara Telake, Kalimantan Timur
2. Setulang, Kalimantan Utara
3. Maloy, Kalimantan Timur.

5. Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)

Palapa Ring merupakan proyek yang menghubungkan kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan jaringan serat optik. Serat optik merupakan infrastruktur yang tepat untuk menggelar layanan broadband.

Karakter proyek Palapa Ring adalah sebagai berikut:

1. Melayani daerah *non-financially feasible* (tidak layak secara bisnis/keuangan);
2. Pemerintah berperan menyediakan penjaminan;
3. Distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha; dan
4. Merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi.

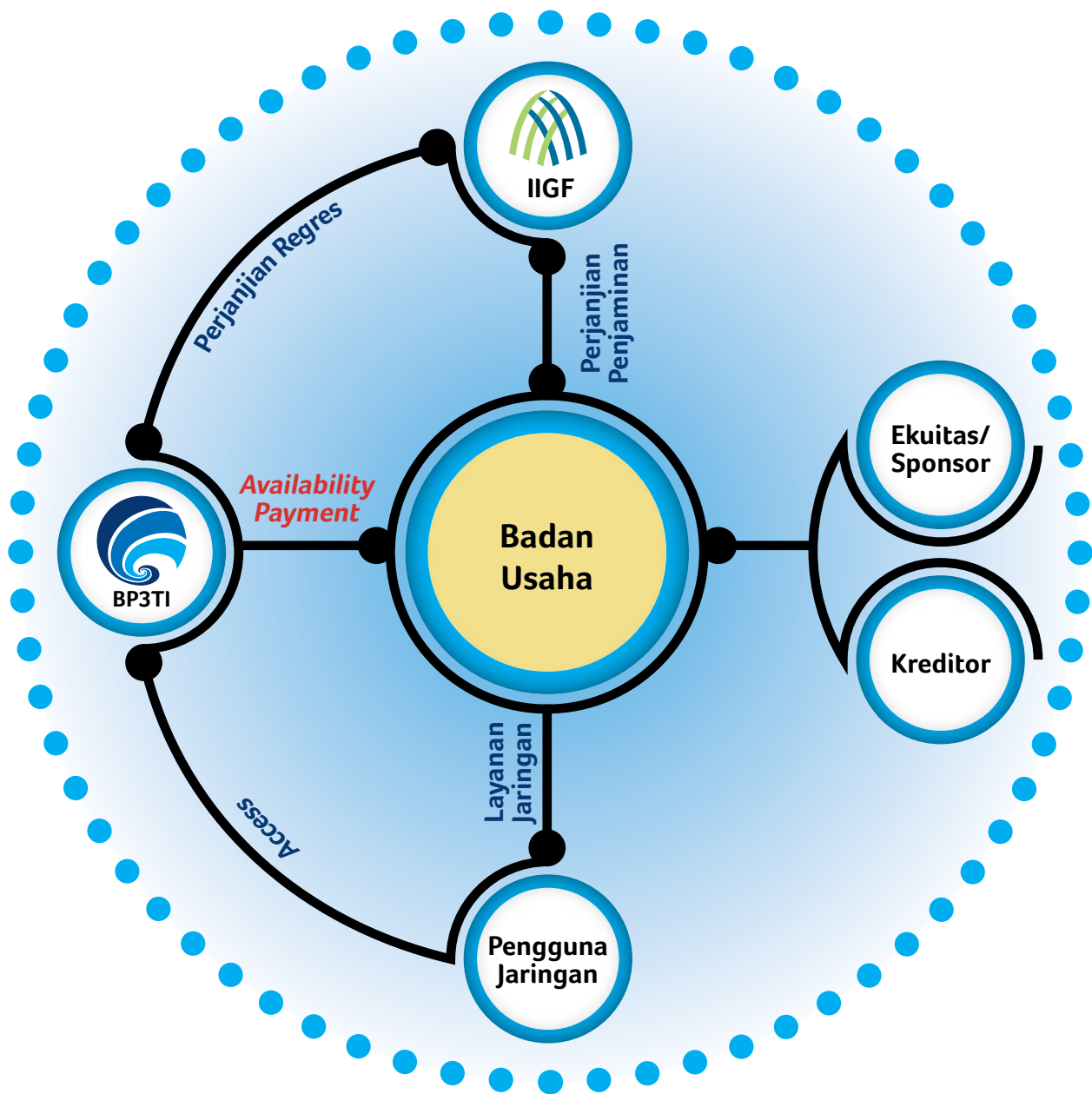
Proyek Palapa Ring akan melayani 57 Kabupaten/Kota di Indonesia yang pelaksanaannya dibagi dalam 3 (tiga) paket, yaitu:

1. Paket Barat yang menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) di 5 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km.
2. Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) di 17 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km.

≡ Pembangunan Infrastruktur

3. Paket Timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) di 35 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km.

Struktur Kerjasama Proyek

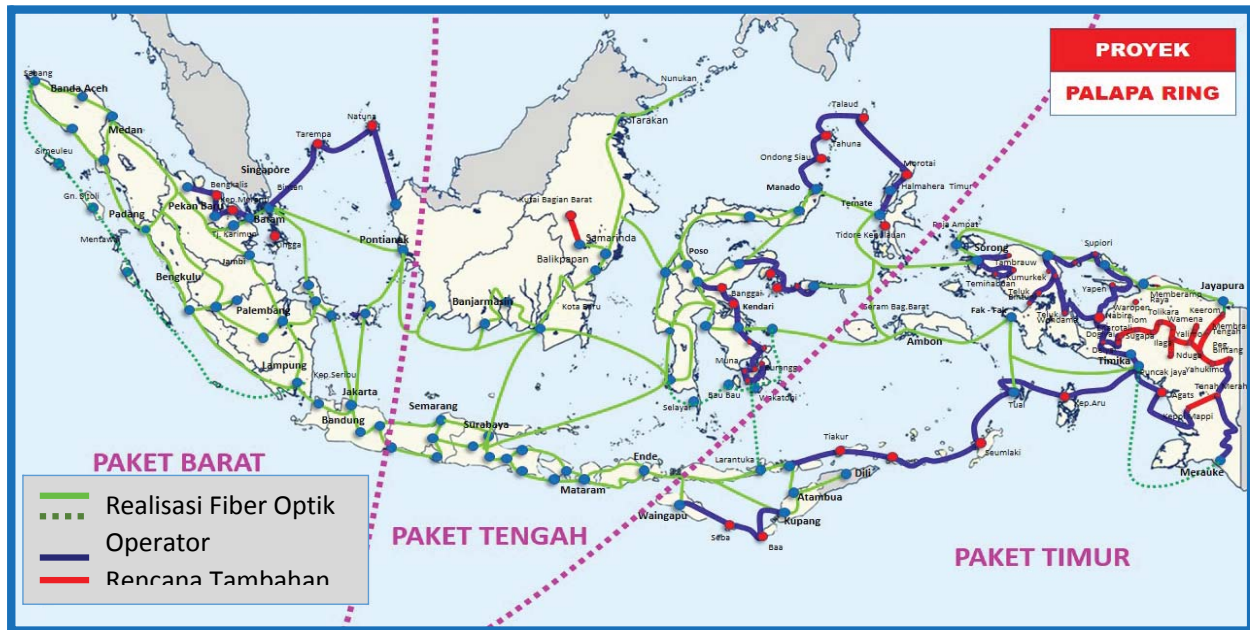


Gambar 3.9 : Struktur kerja sama proyek Palapa Ring

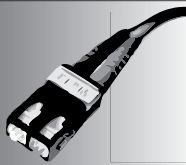
Pembangunan Infrastruktur

Berikut merupakan Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur *Fiber Optic* Palapa Ring yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Paket Proyek Palapa Ring



Gambar 3.10 : Peta Palapa Ring 2015

		Barat	Tengah	Timur
	Jumlah Provinsi	2	5	4
	Jumlah Kab/Kota	5	17	35
	Nilai CAPEX	US\$92,504,000 Rp1,28 triliun	US\$99,250,000 Rp1,38 triliun	US\$368,884,000 Rp5,13 triliun
	Panjang Kabel	1.980 km 88.9% kabel laut 11.1% kabel darat	2.647 km 88.9% kabel laut 11.1% kabel darat 4.5% MW	8.454 km 49.8% kabel laut 45.5% kabel darat 4.7% MW
	Penyelesaian Konstruksi	2018	2018	2018

≡ Pembangunan Infrastruktur

6. ITTS Phase II

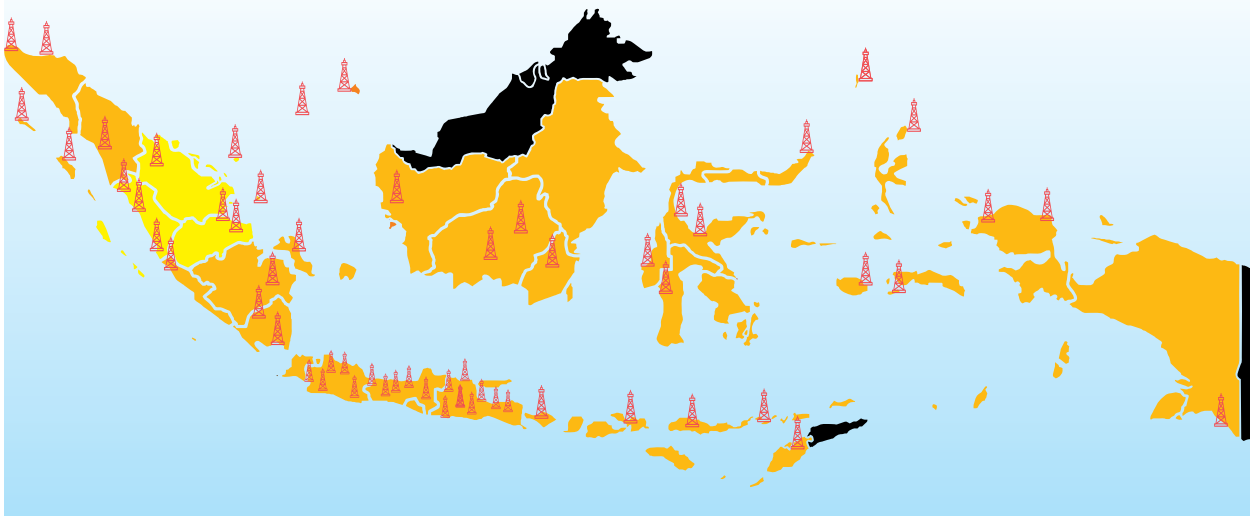
LPP-TVRI sebagai media penyiaran publik mengalami ketersediaan infrastruktur dan kapasitasnya dalam penyebaran informasi untuk mendukung rencana pembangunan nasional sangat terbatas. Cakupan sinyal televisi yang seharusnya mencakup 42% dari wilayah dan lebih dari 80% populasi dalam kenyataannya jauh lebih sedikit dikarenakan perangkat transmisi yang sudah tidak layak karena telah berumur lebih dari 25 tahun.

“Cakupan sinyal televisi yang seharusnya mencakup **42%** dari wilayah dan lebih dari **80%** populasi”



Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dibantu negara Perancis sebagai donor, melaksanakan proyek ITSS II di 60 lokasi dengan 2 tahap yaitu tahun 2015 dibangun sarana prasarana untuk 24 lokasi dan di tahun 2016 akan dibangun untuk 36 lokasi.

Sarana dan prasarana pendukung proyek ITTS phase II antara lain penyediaan tower di beberapa lokasi, pekerjaan sipil berupa rehabilitasi gedung pemancar, peningkatan (*upgrade*) PLN dan pekerjaan pendukung lainnya.

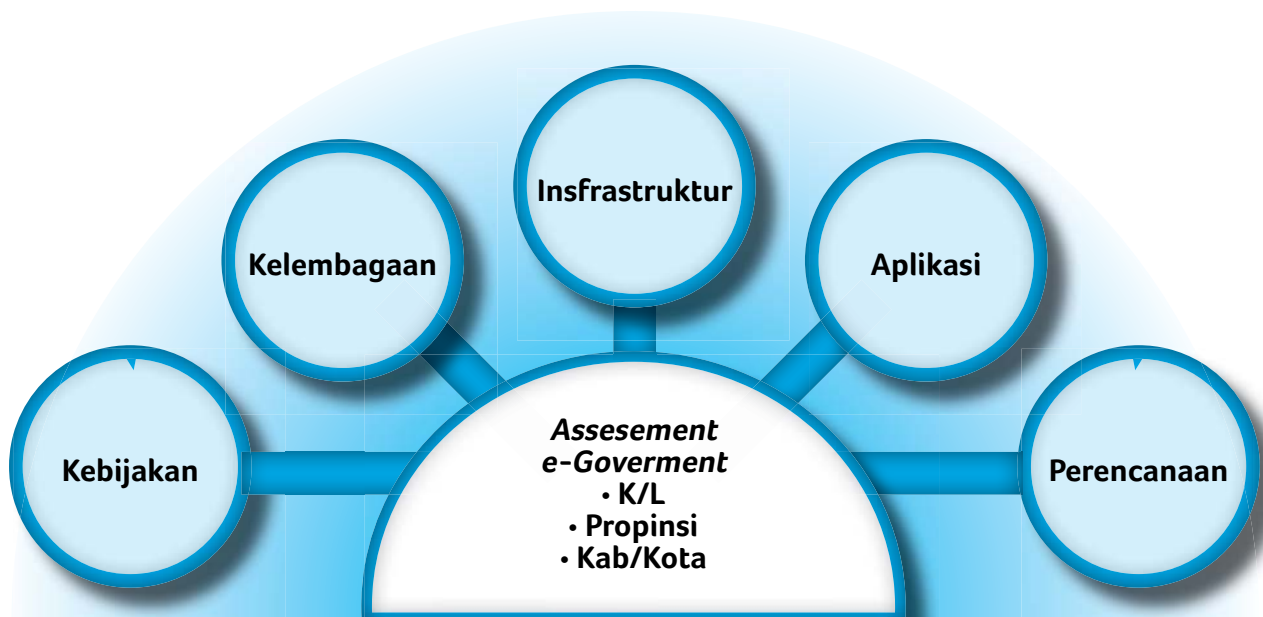


Gambar 3.11 : Peta Lokasi ITTS phase II

TATA KELOLA INTERNET

1. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) adalah kegiatan tahunan Kemkominfo dalam rangka mengevaluasi penerapan e-Government di Instansi Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota secara objektif dan komprehensif. Kegiatan tersebut mencakup aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.



PeGI dilaksanakan pada 4 tingkatan, yaitu kabupaten/kota, provinsi, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) se-Indonesia. Pada tahun 2015, hasil capaian nilai PeGI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Hasil penilaian PeGI tahun 2009-2015

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kementerian	2.5	-	2.5	2.5	2.7	2.7	2,7
LPNK	-	-	-	-	2.7	2.7	2,7
Provinsi	-	-	2.4	2.2	2.6	2.4	2,5
Kabupaten/Kota	-	2.0	2.0	2.2	2.7	2.4	2,8
Rata-rata nilai PeGI Nasional	2.5	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6	2,7

Tata Kelola Internet

2. E-Commerce

Penyusunan Roadmap E-Commerce

Industri *e-commerce* di Indonesia tidak hanya mendukung perekonomian tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi. Pada tahun 2020, volume bisnis *e-commerce* di Indonesia diprediksi mencapai USD130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%.

Pemerintah ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Untuk itu, sejak akhir 2014, segenap instansi pemerintah bekerjasama menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri *e-commerce* lokal di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan beberapa kementerian/lembaga dan asosiasi terkait yang menghasilkan draft Indonesia *e-commerce roadmap* yang berisi inisiatif-inisiatif solusi terkait isu-isu seputar *e-commerce* untuk mendukung dan mendorong potensi pertumbuhan *e-commerce* Indonesia dan harus dikerjakan bersama dengan lembaga terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sinkron



Gambar 3.12 : Prospek Bisnis E-Commerce di Indonesia

Tata Kelola Internet

7 isu utama seputar *e-commerce* di Indonesia yang bersifat *cross-cutting* (lintas stakeholder) secara fungsional, yaitu:

1. Pendanaan (*funding*)
2. Perpajakan (*tax*)
3. Perlindungan Konsumen (*consumer protection*)
4. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (*education and human resources*)
5. Logistik (*logistic*)
6. Infrastruktur Komunikasi (*communication infrastructure*); dan
7. Keamanan Siber (*cyber security*)

Pemerintah juga merumuskan prinsip-prinsip utama pengembangan *e-commerce* lewat aksi afirmatif dengan poin utama pelaku bisnis *e-commerce* lokal terutama pelaku bisnis pemula dan UKM mendapatkan perlindungan yang layak serta menjadi prioritas sebagai berikut:

1. Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi *E-Commerce*.
2. Seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimisasi selama proses transisi menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan bersih harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (*creative destruction*).
4. Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri *E-Commerce* yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional.
5. Pemain nasional, terutama start-up dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bisnis lokal dan pertumbuhan industrinasional harus menjadi prioritas utama.

Sejak akhir 2014, segenap instansi pemerintah bekerjasama menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan *indusrie-commerce* lokal di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan beberapa kementerian/lembaga dan asosiasi terkait yang menghasilkan *draft Indonesia e-commerce roadmap* yang berisi inisiatif-inisiatif solusi terkait isu-isu seputar *e-commerce* untuk mendukung dan mendorong potensi pertumbuhan *e-commerce* Indonesia dan harus dikerjakan bersama dengan lembaga terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sinkron.

3 Segmen Pelaku Utama Bisnis *E-Commerce*:



Pemerintah menargetkan bisnis *e-commerce* di Indonesia dapat mencapai

US\$ **130** miliar
pada 2020

Gambar 3.13 : Roadmap *E-Commerce* Indonesia

3. Keamanan Informasi dan Jaringan Internet



Tata Kelola Internet

KONDISI TINGKAT KEAMANAN INTERNET NASIONAL

November
BAIK

Desember
Buruk

Oktober
Buruk

Agustus
Buruk

September
Sedang

Juli
Sedang

Mei
Sedang

Juni
BAIK

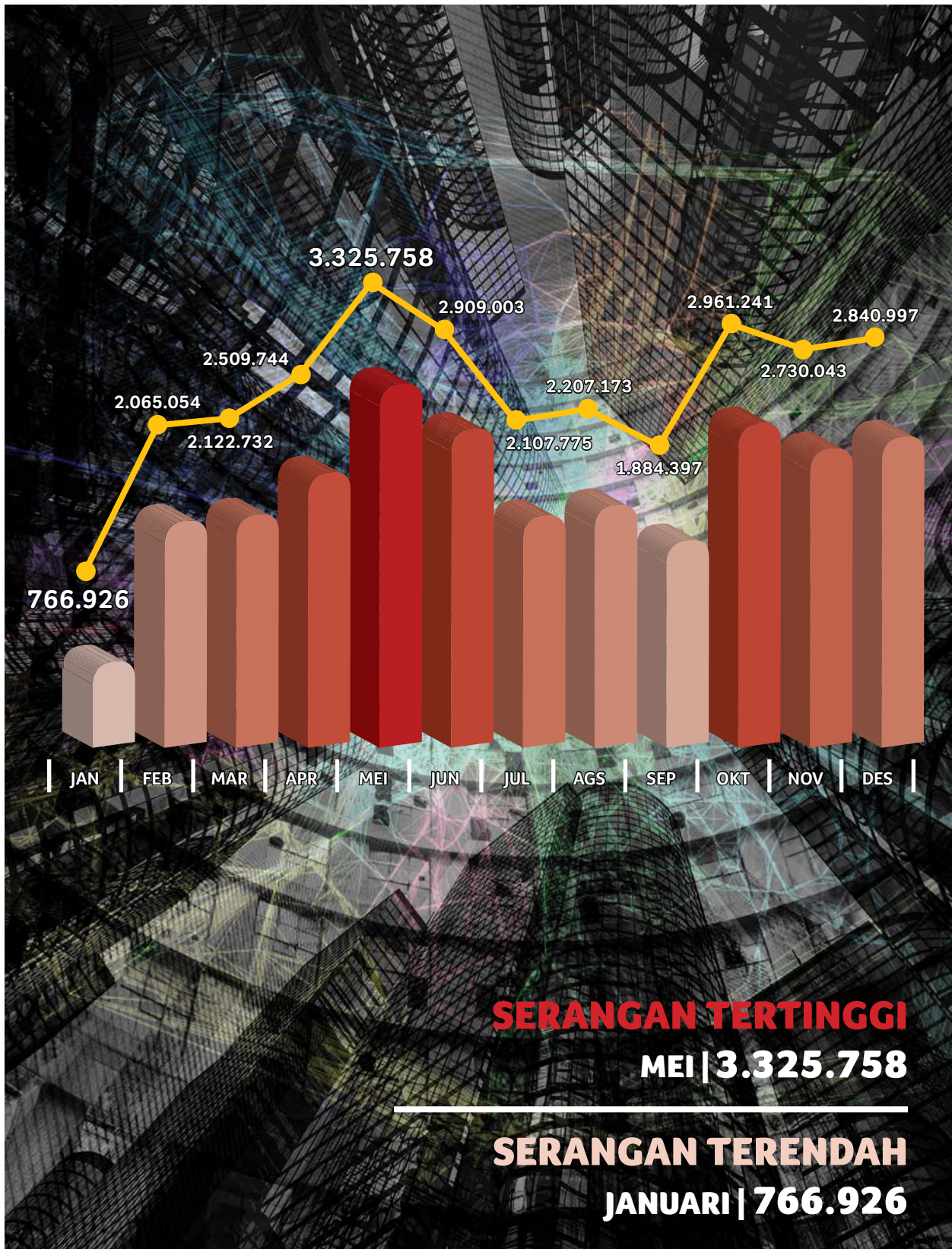
April
Buruk

Februari
Sedang

Maret
Buruk

Januari
Sedang

Tata Kelola Internet



Tata Kelola Internet

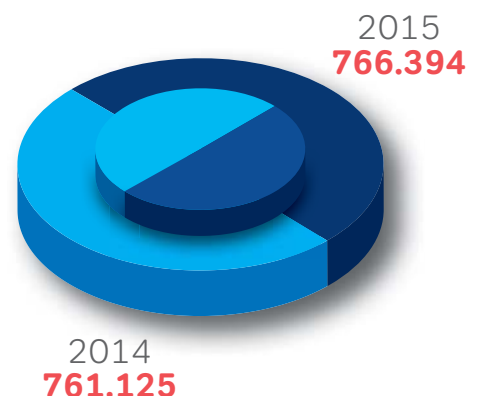
4. Trust +

Kemkominfo dan Panel aktif melakukan kegiatan penanganan situs internet bermuatan negatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi aktif dengan mengadukan situs-situs negatif untuk dilakukan penyaringan dan pemblokiran apabila diperlukan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id atau trustpositif.kominfo.go.id.



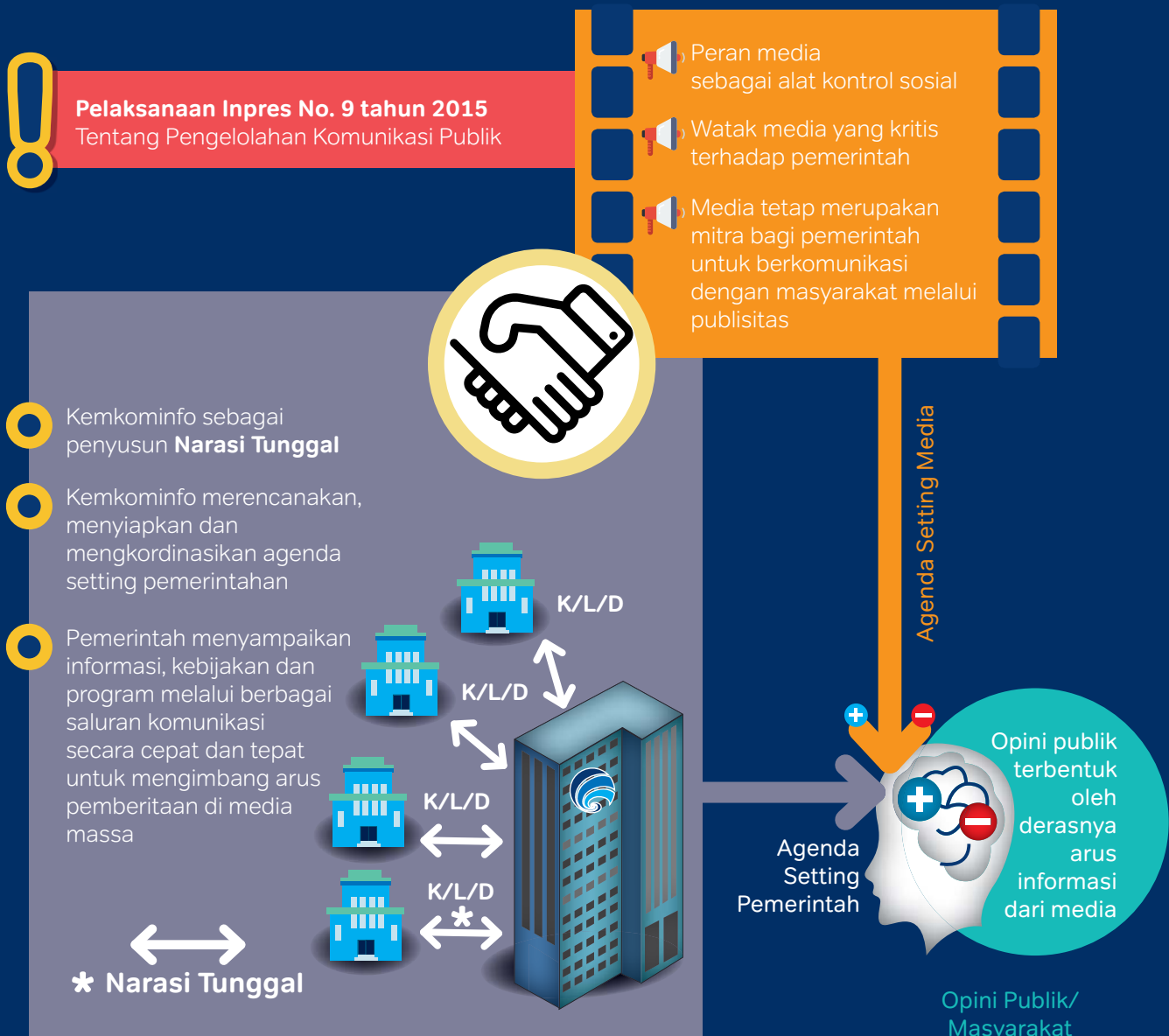
Tabel 3.3 : Jumlah Penapisan Situs Negatif

Media Sosial (2015 - Pornografi)		Media Sosial (SARA / Radikalisme)	
Twitter	1348	Twitter	2
Facebook	720	Facebook	4
Youtube	528	Youtube	78
Jumlah	2.588	Jumlah	84

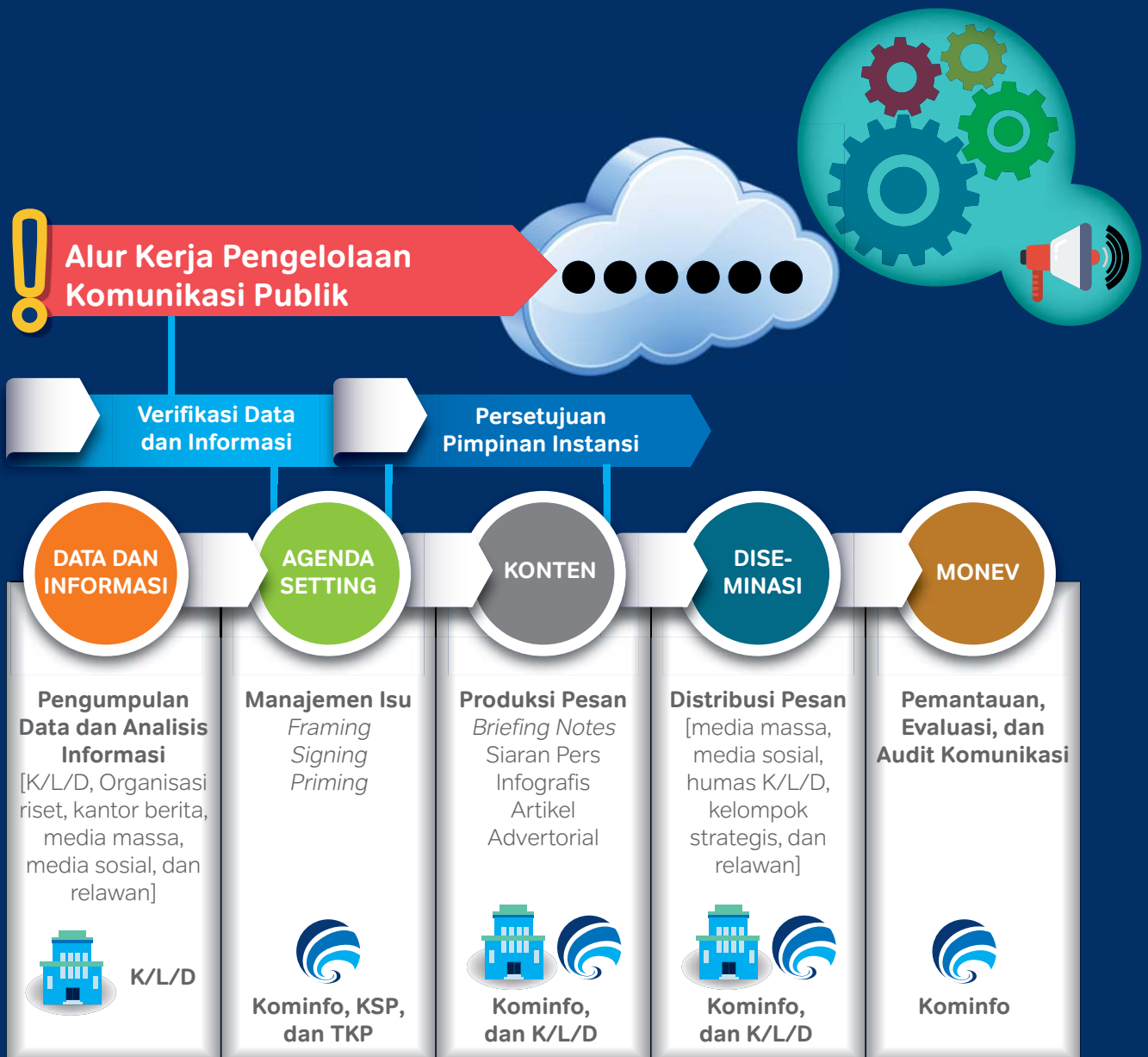


GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DAN DISEMINASI INFORMASI

1. Government Public Relations

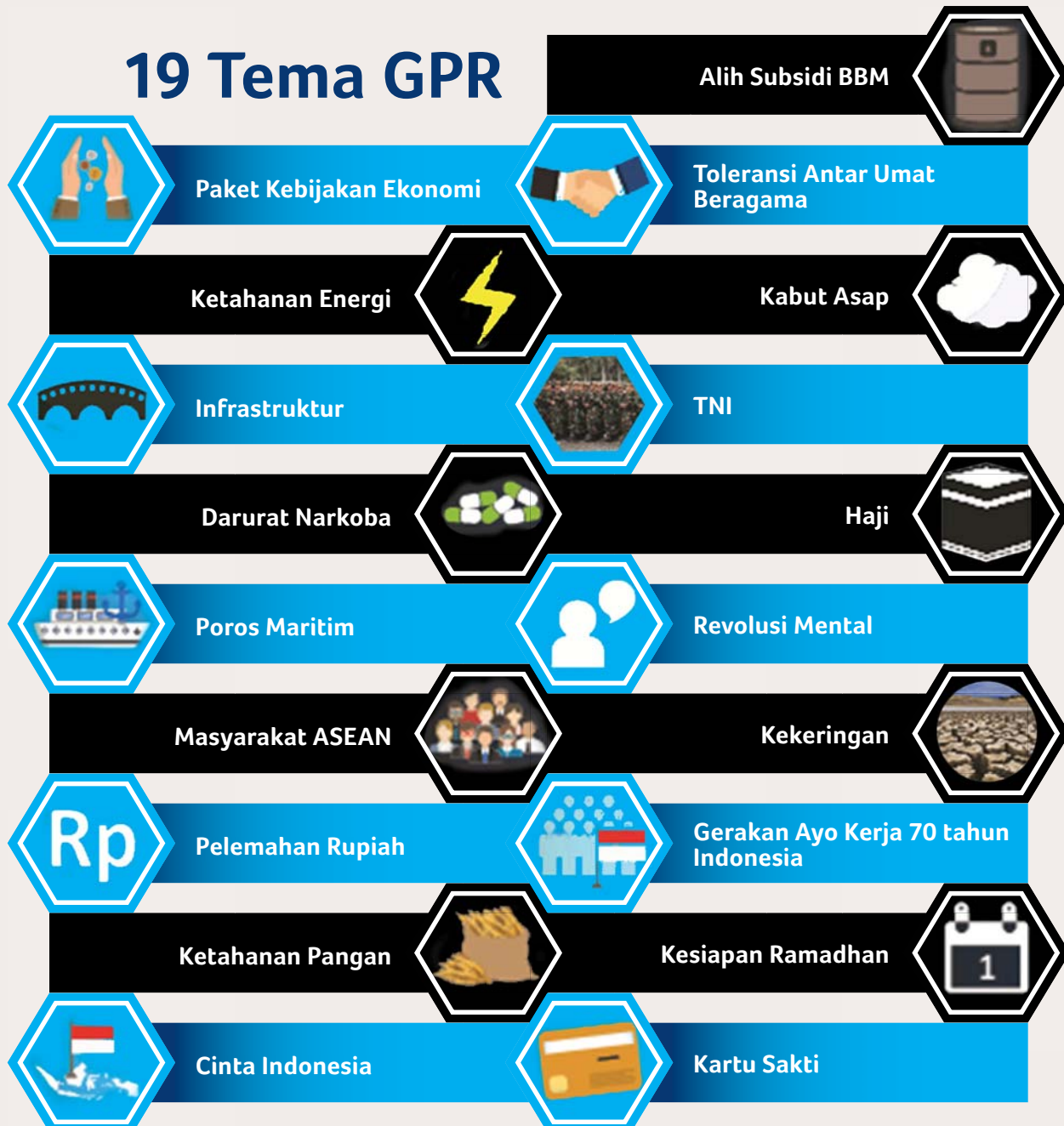


Government Public Relations dan Diseminasi Informasi



≡ Government Public Relations dan Diseminasi Informasi

19 Tema GPR



Government Public Relations dan Diseminasi Informasi

2. Diseminasi Informasi Melalui Website dan Media Sosial



Government Public Relations dan Diseminasi Informasi

3. Diseminasi Revolusi Mental ke Seluruh Pelosok Indonesia



Kegiatan kampanye revolusi mental meliputi sejumlah aktivitas:

1. Penyusunan Strategi Komunikasi Revolusi Mental
2. Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Luar Ruang, dan Media Tradisional terkait kampanye revolusi mental
3. Forum Diskusi Publik dalam rangka menciptakan awareness terhadap kampanye revolusi mental
4. Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan kampanye revolusi mental



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pada tahun 2015, Kementerian Kominfo melaksanakan berbagai kegiatan penelitian terkait broadband, internet dan digitalisasi penyiaran dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Kominfo pada tahun 2015 yang menitikberatkan pada pembangunan akses dan kualitas broadband, terutama di lokasi prioritas yang ditetapkan Pemerintah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo selama tahun 2015:



Studi Dampak Sosial Ekonomi terhadap Broadband di Indonesia.



Survei Kebutuhan Informasi Masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Politik, dan Budaya, dan Kemaritiman pada Masyarakat Nelayan.



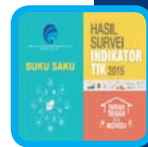
Optimalisasi Pemanfaatan Internet Desa berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Website Desa



Model Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Produktivitas Melalui Optimalisasi Fungsi NIX.



Studi Pengembangan Pasar Smart Card di Indonesia.



Kajian Indikator Kominfo 2015



ICT White Paper



Studi Pengembangan Model/Pola Kemitraan Pusat&Daerah Dalam Rangka Integrasi Infrastruktur Jalan & Telekomunikasi



Strategi Implementasi Radio Siaran Digital di Indonesia



Kajian Pemetaan Industri Konten dan Aplikasi Indonesia



Kajian Opini Publik

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jurnal dan Publikasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2015:

Jurnal Terakreditasi

- Buletin Pos dan Telekomunikasi
- Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika IPTEK-KOM
- Jurnal Studi Komunikasi dan Media
- Jurnal Penelitian Komunikasi
- Jurnal Pekommas

Jurnal Online

- Puslitbang SDPPI: Buletin Pos dan Telekomunikasi
- BPPKI Jakarta: Jurnal Studi Komunikasi dan Media

Publikasi Ilmiah dan Populer

- Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika
- Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik
- Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
- Mediakom
- Observasi
- Bunga Rampai Penelitian
- Majalah Komunikasi Massa
- Majalah Kupas



Buku Putih Komunikasi dan Informatika Indonesia 2015 (ICT Whitepaper) disusun dalam rangka menyediakan informasi pembangunan TIK yang telah dilakukan dan arah pengembangan serta kebijakan yang diambil dalam pembangunan TIK di Indonesia.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Pengembangan Profesi Bidang Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana hingga 2015, terdapat 21 (dua puluh satu) SKKNI bidang kominfo, yaitu 8 (delapan) standar di bidang komunikasi dan 13 (tiga belas) standar di bidang informatika.



Gambar 3.14 : SKKNI dan RSKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pendekatan Ekosistem SKKNI

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara lebih terukur, Pemerintah tengah menyusun kebijakan standardisasi profesi tenaga kerja nasional melalui sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, dan tenaga kerja Indonesia sebagai acuan dan produk hukum yang mendasari keberadaan sistem sertifikasi untuk mengukur kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi tersebut akan memudahkan dunia industri dalam melaksanakan pembinaan pegawai dan memastikan bahwa kompetensi tenaga kerja diakui oleh pihak lain sepanjang yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi.

1. Peraturan Menkominfo 24/2015 Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo

- Sosialisasi tentang Pemberlakuan SKKNI ke Pelaku Industri (1 Januari 2016)
- Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

2. PENYUSUNAN SKKNI BIDANG KOMINFO

- Penyusunan Rancangan SKKNI
- Fasilitasi Penyusunan Skema & Modul Sertifikasi

3. PENGUATAN SDM&LEMBAGA

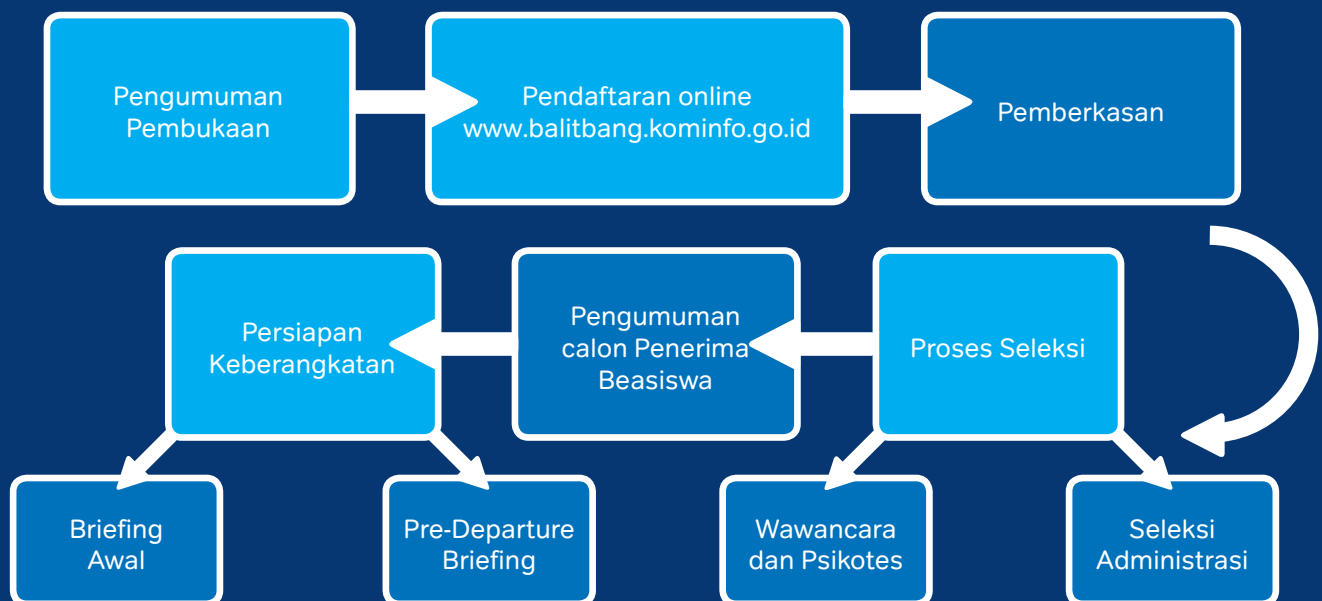
- Pelatihan&/Sertifikasi
 - 1.478 Instruktur BLK&SMK,
 - 11.785 Angkatan Kerja Muda
- Fasilitasi dan Pendampingan dalam rangka Akselerasi Pembentukan LSP

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Penyelenggaraan Beasiswa Paskasarjana Dalam dan Luar Negeri

Beasiswa ditujukan bagi aparatur pemerintah, industri dan masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika, dan diharapkan dapat menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten melalui pendidikan formal sehingga sesuai dengan standar kompetensi profesi. Program beasiswa *magister* dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, diantaranya

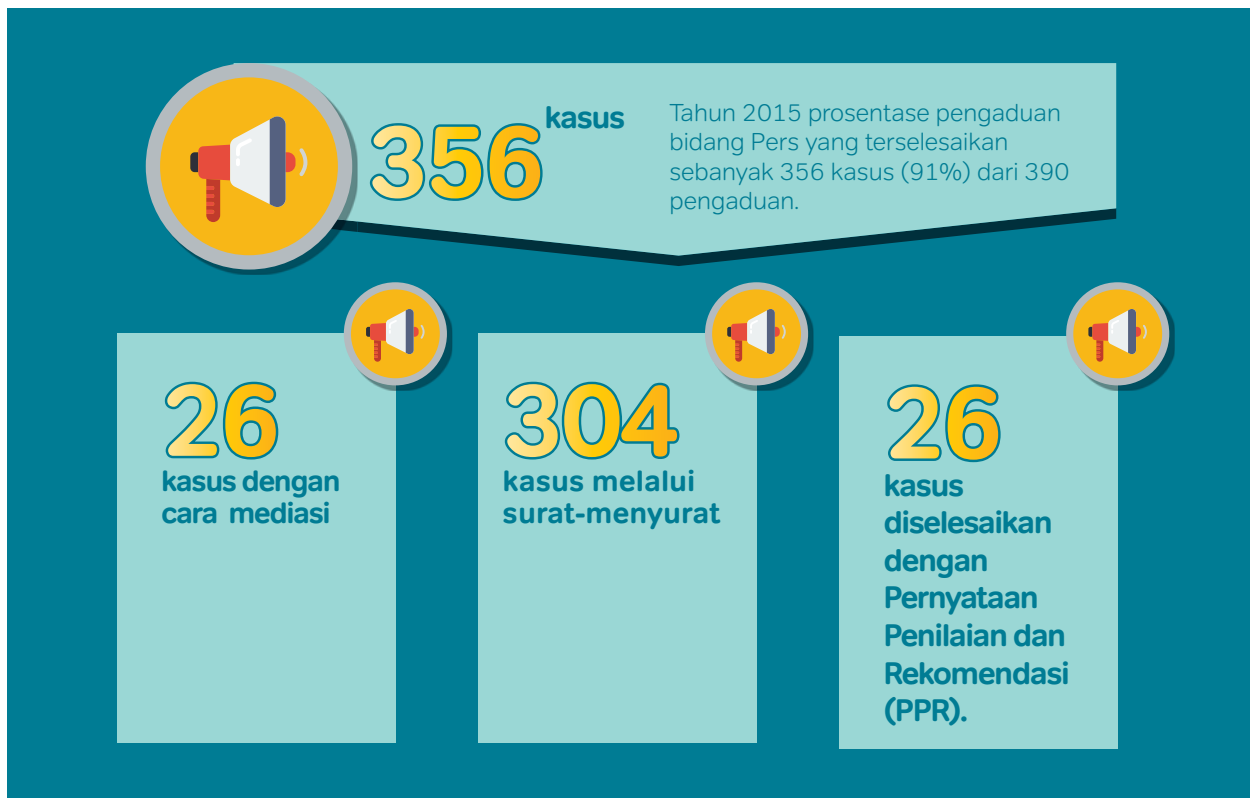
UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, USU, UNHAS, UNS, UNP, dan UNAND. Sedangkan program *magister* luar negeri diselenggarakan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di berbagai Negara yaitu Australia, Belanda, Hongkong, Inggris, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Untuk program beasiswa tahun 2015, Kemkominfo memberikan 212 beasiswa baik dalam dan luar negeri.



Gambar 3.15 : Alur Penerimaan Beasiswa S2 Luar Negeri

KINERJA LAINNYA

1. Pengaduan Bidang Pers



2. Pengaduan Bidang Penyiaran

Tabel 3.4 : Jumlah Pengaduan Bidang Penyiaran

No.	Sumber Pengaduan	Jumlah
1.	Email	5.472
2.	Sms	1.221
3.	Telepon	31
4.	Twitter	2.032
5.	Surat	232
6.	Face book	410
Total		9.410

Dari 9.410 pengaduan tersebut, semua ditindak lanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dengan keputusan 267 pengaduan mendapatkan sangsi administrasi, berupa 262 teguran; 5 penghentian sementara; dan sisanya sebanyak 9.143 pengaduan dengan melalui proses analisis program dinyatakan tidak melanggar.

≡ Kinerja Lainnya

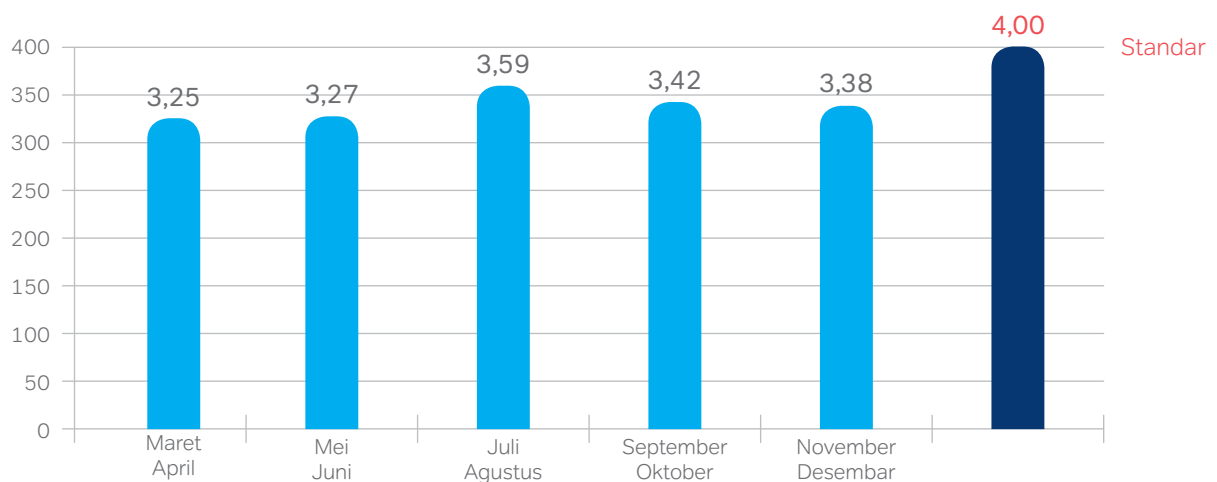
3. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi



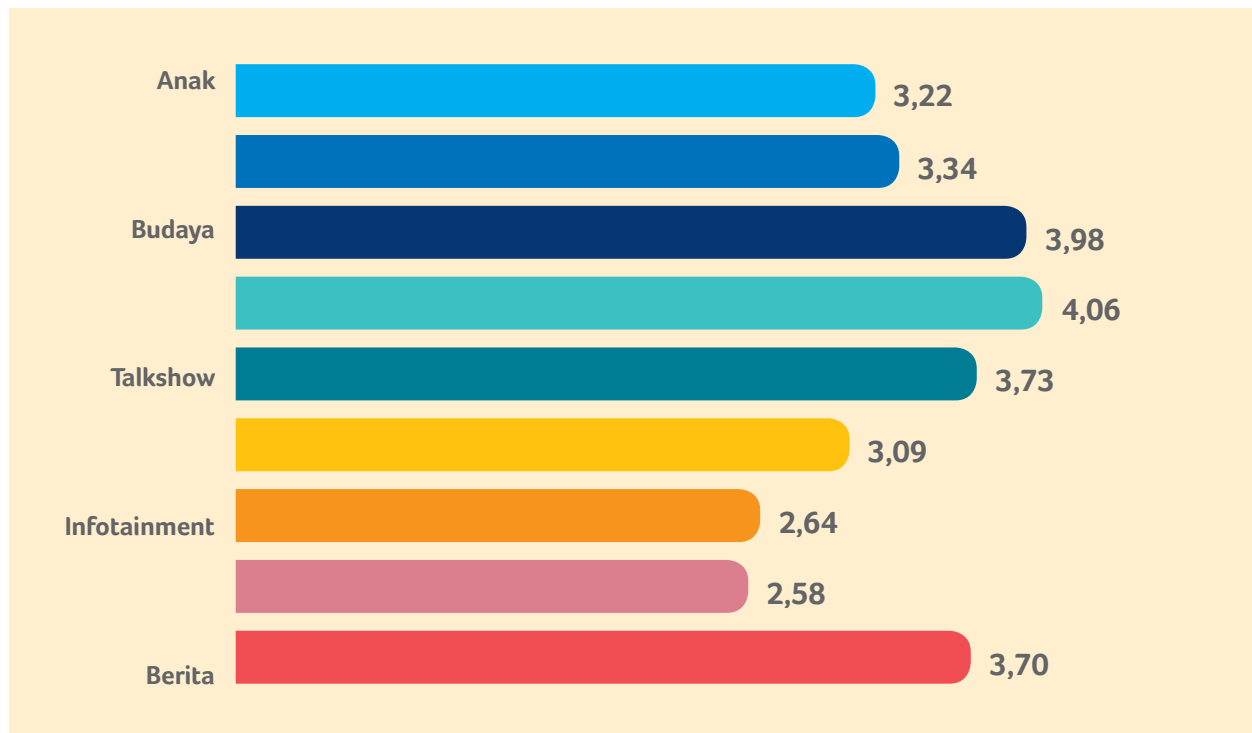
4. Rating Siaran Televisi (TV)

Dalam rangka mengevaluasi kualitas siaran TV, Komisi Penyiaran Indonesia melaksanakan rating terhadap isi siaran TV. Populasi dari penelitian ini adalah semua program siaran yang ditayangkan di 15 stasiun televisi nasional (ANTV, Global, Indosiar, MetroTV, MNCTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, TVOne, TVRI, RTV, Sindo TV, Kompas TV dan Net.) pada rentang waktu jam 05.00-24.00 selama dua bulan. Asumsinya, setiap stasiun televisi rata-rata menayangkan 20-an program siaran setiap harinya dalam rentang waktu jam 05.00-24.00. Program siaran diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kategori 9 program siaran : berita, sinetron/ FTV/film, variety show, talkshow, religi, budaya/wisata, infotainment, komedi dan anak-anak.

Tabel 3.5 : Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran TV



≡ Kinerja Lainnya

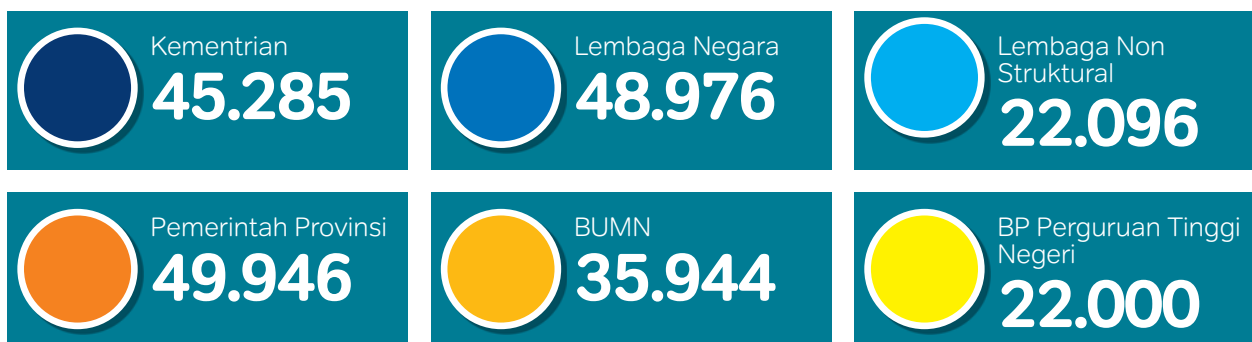


Gambar 3.16 : Indeks kualitas siaran per program siaran

« 5. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015

Pada tahun 2015 hasil penilaian *self assessment*, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah :

Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 per kategori adalah :



Laporan Tahunan 2015



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110

www.kominfo.go.id